

Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran



Media Wahyudi Askar
Isnawati Hidayah
Bhima Yudhistira
Adhinegara
Yoby Afis
Aulia Lianasari
M Satria Riza Permana
M. Bakhrul Fikri
Galau D Muhammad
Tim Kabinet Bayangan

RAPOR 2 TAHUN KABINET PRABOWO - GIBRAN	
Nama	Nilai
Prabowo Subianto	4,6
Gibran Rakabuming Raka	4,9
Nilai Akhir	
4,7	

No.	Komponen Penilaian	Nilai	
		Angka	Keterangan
1	Masuknya Militer ke Ranah Sipil	74%	Responden menilai Pemerintah melakukan penguatan peran militer ke ranah sipil.
2	Penguatan Peran Pemerintah Pusat Merugikan Daerah	54%	Responden menilai sentralisasi yang terjadi merugikan Pemerintah Daerah.
3	Kondisi Mental dan Fisik Presiden Diragukan	61%	23% , responden menilai kondisi mental dan fisik Presiden tidak baik sama sekali dan 38% menilai kurang baik.
4	Kondisi Ekonomi Memburuk Dibanding Tahun Lalu	53%	53% responden menyatakan kondisi ekonomi lebih buruk dibandingkan tahun lalu
5	Pemerintah Tak Mampu Atasi Masalah Pengangguran dan Lapangan Kerja	62%	24% responden menilai kebijakan Pemerintah sangat buruk, 38% menilai buruk.
6	Pajak dan Pungutan Membebani Masyarakat	82%	Responden menilai Pajak dan Pungutan sangat membebani masyarakat.
7	Setuju MBG Dihentikan	76%	Responden menilai MBG harus dihentikan.
8	Pemerintah Tidak Mampu Tangani Karhutla	96%	74% responden menilai Pemerintah sangat tidak efektif dan 22% menilai tidak efektif dalam menangani kebakaran hutan dan lahan
9	Kunjungan Luar Negeri Tidak Ada Manfaat Nyata	66%	Responden menilai kunjungan luar negeri Presiden tidak membawa manfaat bagi masyarakat.
10	Utang Pemerintah Membebani Generasi Mendatang	63%	Responden menilai utang Pemerintah hari ini akan membebani generasi masa depan.
11	Tidak Memilih Prabowo Lagi	55%	Responden yang memilih Prabowo di 2024, menyatakan kecewa dan tidak akan memilih lagi di Pemilu selanjutnya.
12	Stres dengan Kebijakan Pemerintah	75%	Responden yang merasakan stres akibat dari kebijakan yang dibuat Pemerintah.
13	Stres dengan Perilaku Prabowo	67%	Responden dibuat stres oleh perilaku Prabowo Subianto

10 Pejabat dengan Kinerja Terburuk dan Harus Di-reshuffle

1		Bahli Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	-159 Poin
2		Natalius Pigai Menteri Hak Asasi Manusia	-158 Poin
3		Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan	-103 Poin
4		Sudaryono Kepala Badan Gizi Nasional	-47 Poin
5		Zulkifli Hasan Menteri Koordinator Bidang Pangan	-43 Poin
6		Nusron Wahid Menteri Agraria dan Tata Ruang	-24 Poin
7		Pratikno Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-17 Poin
8		Saifullah Yusuf Menteri Sosial	-17 Poin
9		Muhaimin Iskandar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	-16 Poin
10		Fadli Zon Menteri Kebudayaan	-16 Poin

2 Metodologi

Studi ini menggunakan pendekatan survei yang dirancang secara terpisah untuk masyarakat umum, dan kelompok ahli, dengan metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok. Pengumpulan data mulai dilakukan sejak tanggal 15 September - 9 Oktober 2026. Survei masyarakat umum menggunakan pendekatan *non-probability sampling* melalui Meta Ads, yang kemudian dilengkapi dengan pembobotan (*weighting*) untuk menyesuaikan komposisi sampel dengan karakteristik populasi yang menjadi acuan. Sedangkan survei ahli menggunakan *snowball sampling* untuk menjangkau responden dengan keahlian dan pengalaman yang relevan. Penyusunan instrumen dilakukan melalui proses yang ketat, termasuk uji validitas dan reliabilitas, serta penelaahan oleh pihak eksternal untuk memastikan pertanyaan disusun secara objektif, memiliki kualitas pengukuran yang memadai, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

2.1. Uji Validitas, dan Reliabilitas

Para Ahli (*Expert Judgement*)

Survei ini juga mengumpulkan data untuk *expert judgment*, menggunakan pendekatan *snowball sampling* dalam proses pengumpulan data, yaitu responden awal yang memenuhi kriteria keahlian diminta untuk merekomendasikan ahli lain yang relevan dengan topik penelitian. Survei ini melibatkan 129 responden ahli dengan latar belakang keahlian, wilayah domisili, dan pengalaman profesional yang beragam. Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap pertanyaan berskala dalam survei ahli untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan mampu mengukur aspek yang diteliti secara tepat dan konsisten. Validitas item diuji menggunakan korelasi Pearson antara skor item dan skor total, sedangkan validitas konstruk dievaluasi melalui analisis faktor eksploratori dengan mempertimbangkan nilai *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO), uji *Bartlett*, dan *factor loading*.

Reliabilitas instrumen diukur menggunakan *Cronbach's alpha* terstandar dengan ambang $\geq 0,70$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Skala Penilaian Kinerja Pemerintah atas 11 item yang valid dan memiliki reliabilitas sangat baik ($\alpha=0,895$; KMO=0,797; Bartlett $p<0,001$), sementara pertanyaan yang berhubungan dengan kekhawatiran responden (yang terdiri atas dua item: kekhawatiran terhadap arah kebijakan dan gaya kepemimpinan) juga menunjukkan reliabilitas yang baik (r antar-item=0,768; koefisien Spearman-Brown=0,869). Hasil analisis faktor gabungan mengidentifikasi tiga dimensi utama dalam instrumen, yaitu penilaian terhadap pemimpin, efektivitas kebijakan, dan tingkat kekhawatiran. Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki struktur pengukuran yang cukup jelas serta tingkat validitas konstruk dan konsistensi internal yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.1. Uji Validitas, dan Reliabilitas

Masyarakat Umum

Pengumpulan data masyarakat umum melibatkan 1.142 responden yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap pertanyaan berskala dalam survei masyarakat umum untuk memastikan bahwa instrumen mampu mengukur penilaian publik terhadap pemerintahan secara tepat dan konsisten. Pengujian validitas konstruk menunjukkan bahwa data sangat layak untuk analisis faktor ($KMO=0,956$; Bartlett $p<0,001$), dengan satu faktor utama yang menjelaskan 56,2% variasi jawaban, sehingga secara umum item-item tersebut merepresentasikan satu dimensi utama penilaian publik terhadap pemerintahan. Dari sisi reliabilitas, instrumen menunjukkan konsistensi internal yang sangat tinggi, dengan *Cronbach's alpha* terstandarisasi sebesar 0,950 dan *McDonald's ω* sebesar 0,952; hasil ini juga tetap stabil dalam berbagai uji sensitivitas. Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa 17 item dalam skala akhir memiliki validitas konstruk dan konsistensi internal yang dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan dalam analisis penilaian publik terhadap pemerintahan.

2.2.

Metode Analisis Pemeringkatan Kinerja Kabinet

Studi ini menyusun peringkat kinerja menteri berdasarkan persepsi responden dengan menggunakan *positional scoring rule*, yaitu setiap posisi dalam urutan pilihan (pertanyaan survei) diberikan bobot tertentu. Skema pembobotan mengadaptasi sistem yang digunakan dalam *Ballon d'Or*. Pendekatan ini merupakan pengembangan dari *Borda Count*, yang mengagregasikan preferensi responden dengan mempertimbangkan posisi masing-masing kandidat dalam urutan pilihan (Young, 1975)¹.

Secara teoritis, Young (1974)² menunjukkan bahwa *Borda's Rule* memiliki sejumlah karakteristik penting, yaitu *neutrality*, *consistency*, *faithfulness*, dan *cancellation*. Skema pembobotan yang digunakan dalam studi ini tetap mempertahankan tiga karakteristik pertama, tetapi tidak memenuhi prinsip *cancellation* karena memberikan bobot yang lebih besar pada kandidat yang menempati posisi teratas. Pilihan ini dilakukan secara sengaja agar hasil pemeringkatan lebih sensitif terhadap menteri yang secara konsisten ditempatkan responden pada peringkat tertinggi, bukan sekadar sering muncul dalam daftar pilihan.

¹ Young (1975), "Social Choice Scoring Functions", *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 28(4)

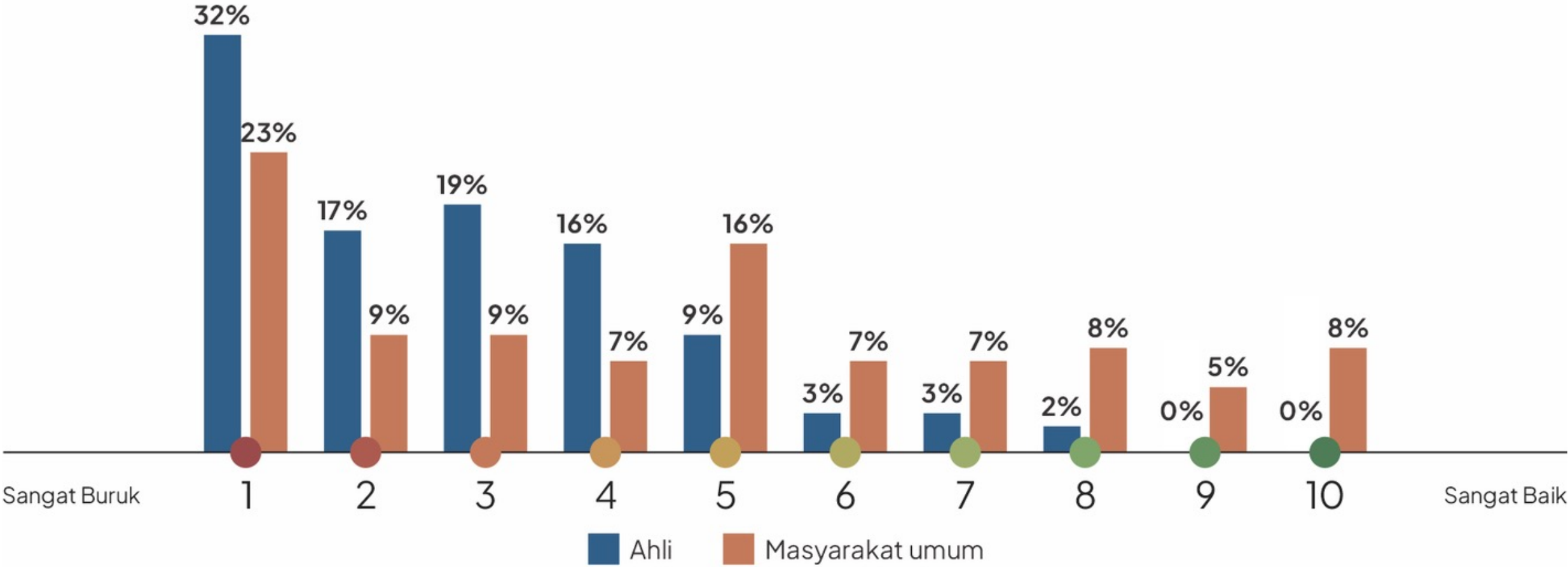
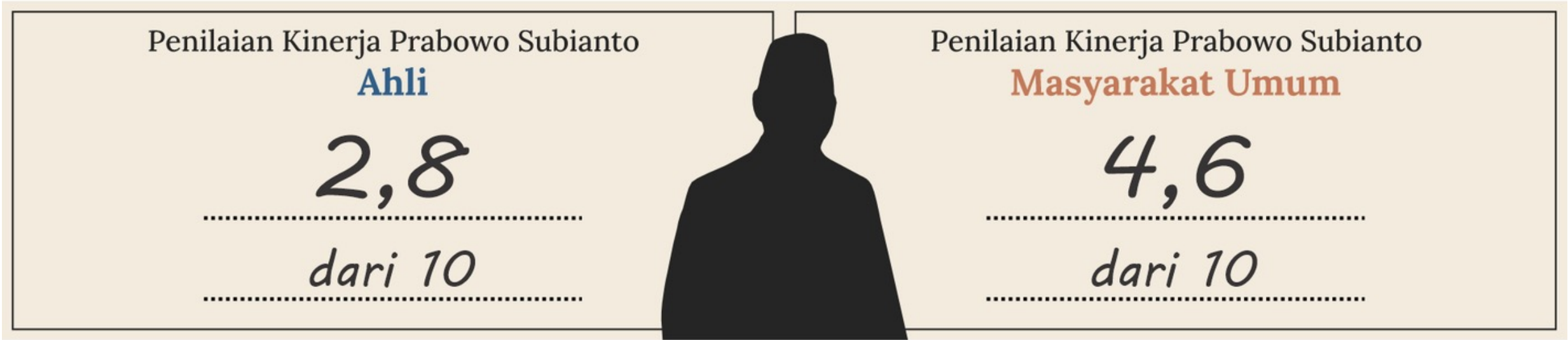
² Young, H. P. (1974). An axiomatization of Borda's rule. *Journal of Economic Theory*, 9(1), 43–52

3

Rapor Presiden, Wakil Presiden, dan Para Menteri



Penilaian Kinerja 2 Tahun Presiden Prabowo Subianto

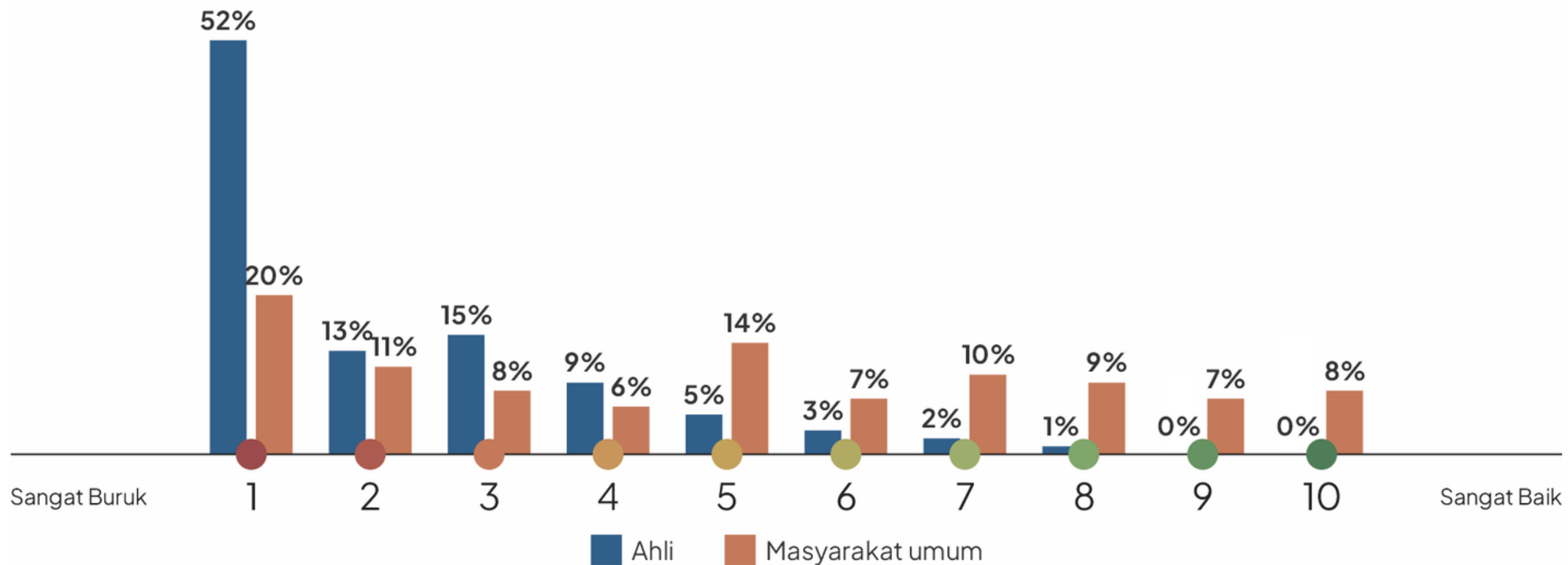
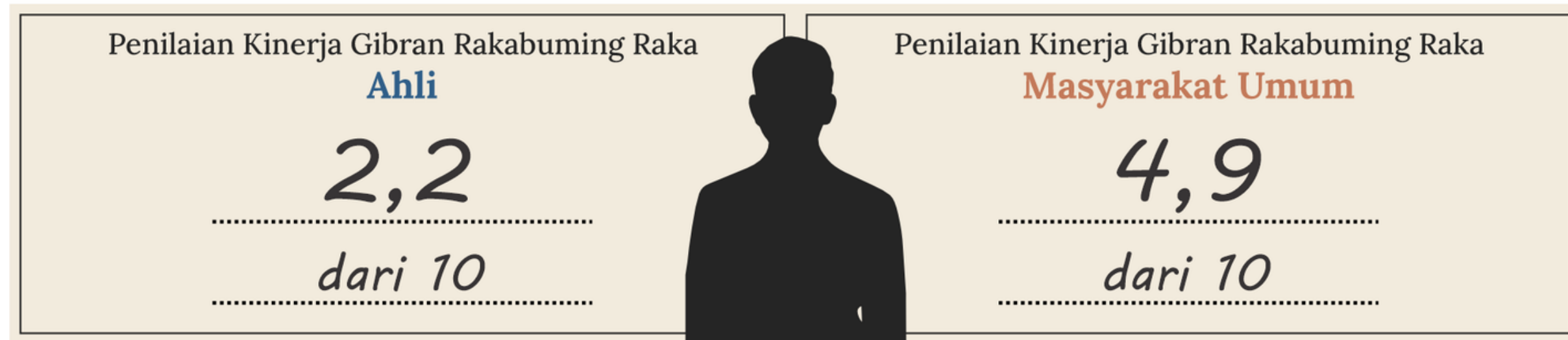


Sumber:

Survei Masyarakat Umum (1.142), dan Ahli (N = 129), diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan "Bagaimana Anda menilai kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan selama dua tahun terakhir?"

Penilaian Kinerja 2 Tahun Wakil Presiden Gibran Rakabuming

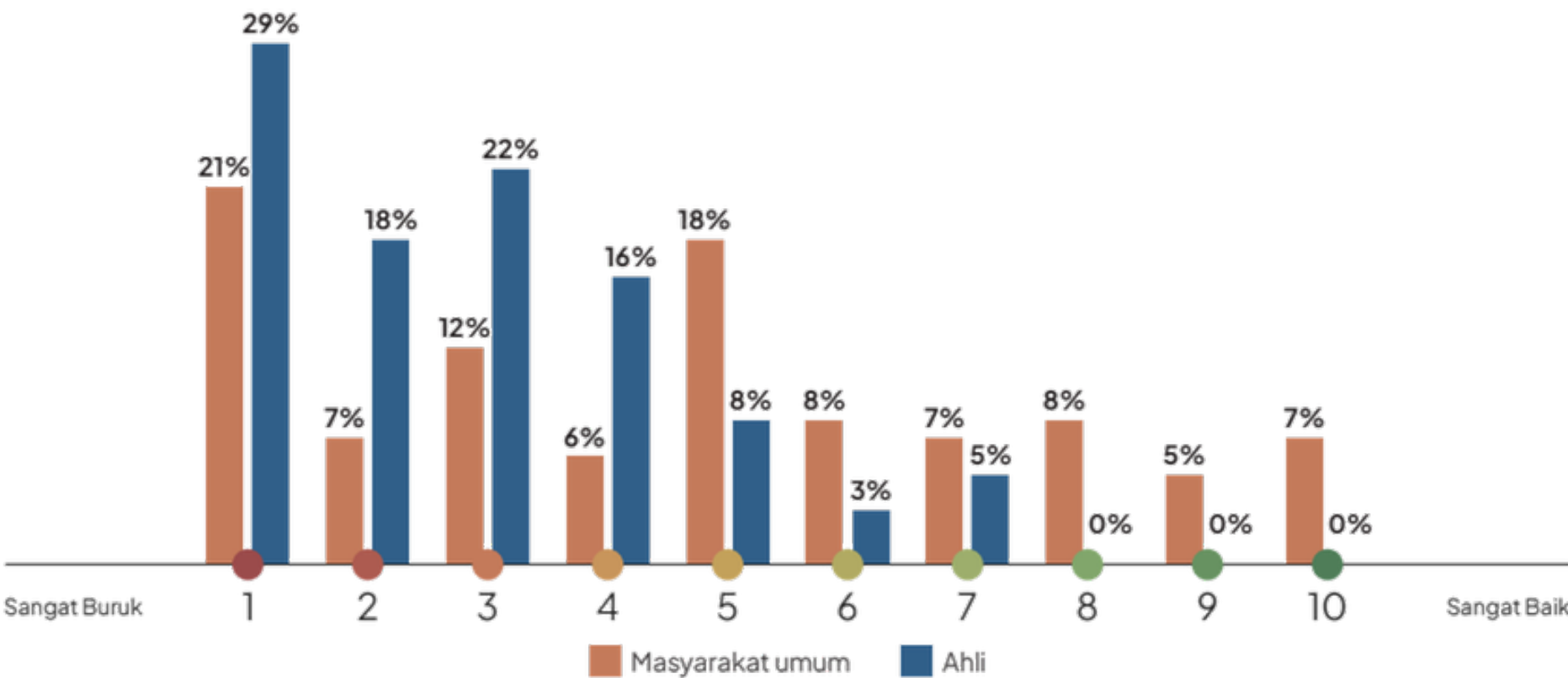


Sumber:

Survei Masyarakat Umum (1.142), dan Ahli (N = 129), diolah oleh peneliti.

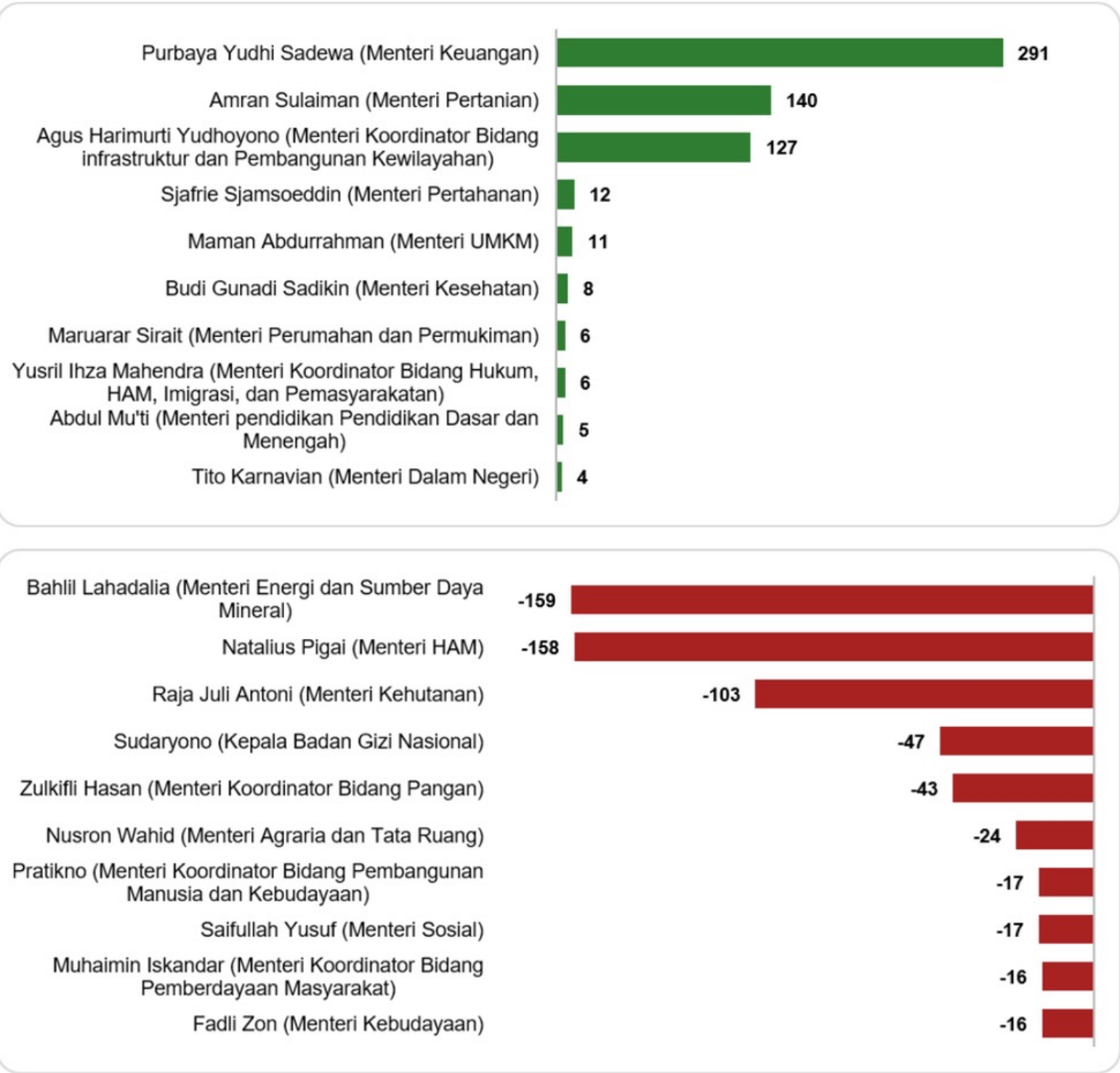
Responden ditanyakan "Bagaimana Anda menilai kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya selama dua tahun terakhir?"

Penilaian Kinerja 2 Tahun Kabinet Prabowo–Gibran



Sumber:
Survei Masyarakat Umum (N=1.142), dan Ahli (N = 129), diolah oleh peneliti.
Responden ditanyakan "Bagaimana Anda menilai kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran secara keseluruhan selama dua tahun terakhir?"

Menteri Dengan Kinerja Terbaik Hingga Terburuk



Sumber:
Survei Masyarakat Umum CELIOS (2026), diolah oleh peneliti. Skor merupakan selisih antara penilaian terbaik dan terburuk (N=994).
Catatan: Survei dilakukan setelah reshuffle Menteri Keuangan dan sebelum reshuffle Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

5

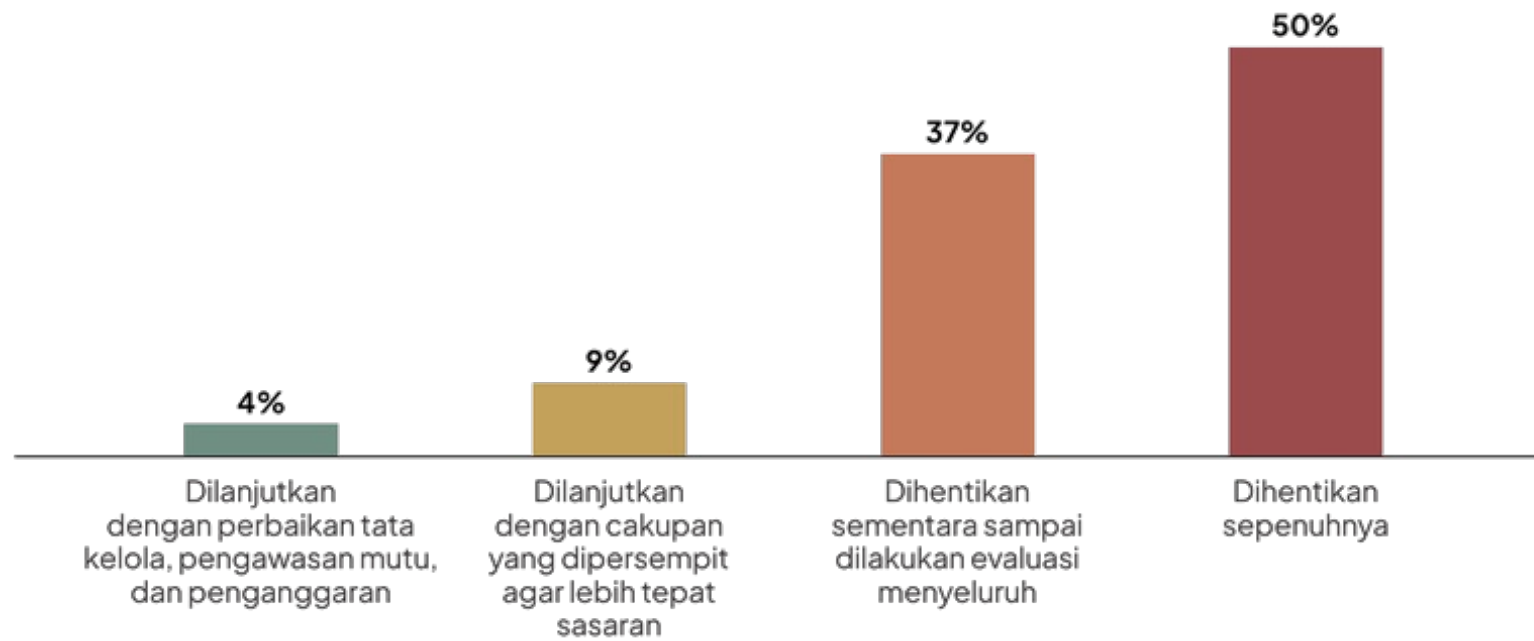
Penilaian Capaian Program Kerja Kabinet Merah Putih Berbasis Sektor



5.1 Implementasi Program Prioritas

Gambar 6

Persepsi Ahli terhadap Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis



Sumber:

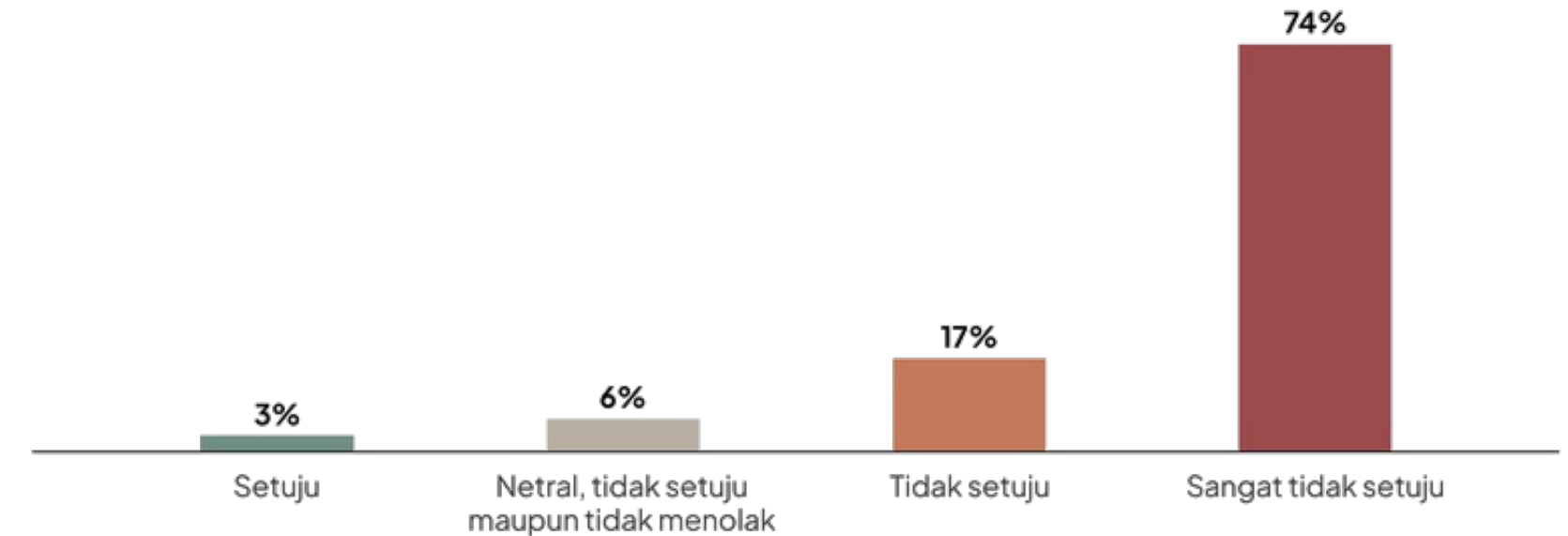
Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Manakah pernyataan berikut yang paling mendekati pandangan Anda mengenai kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG)?"

Opsi jawaban meliputi "Dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola, pengawasan mutu, dan penganggaran", "Dilanjutkan dengan cakupan yang dipersempit agar lebih tepat sasaran", "Dihentikan sementara sampai dilakukan evaluasi menyeluruh", dan "Dihentikan sepenuhnya".

Gambar 8

Persepsi Ahli terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



Sumber:

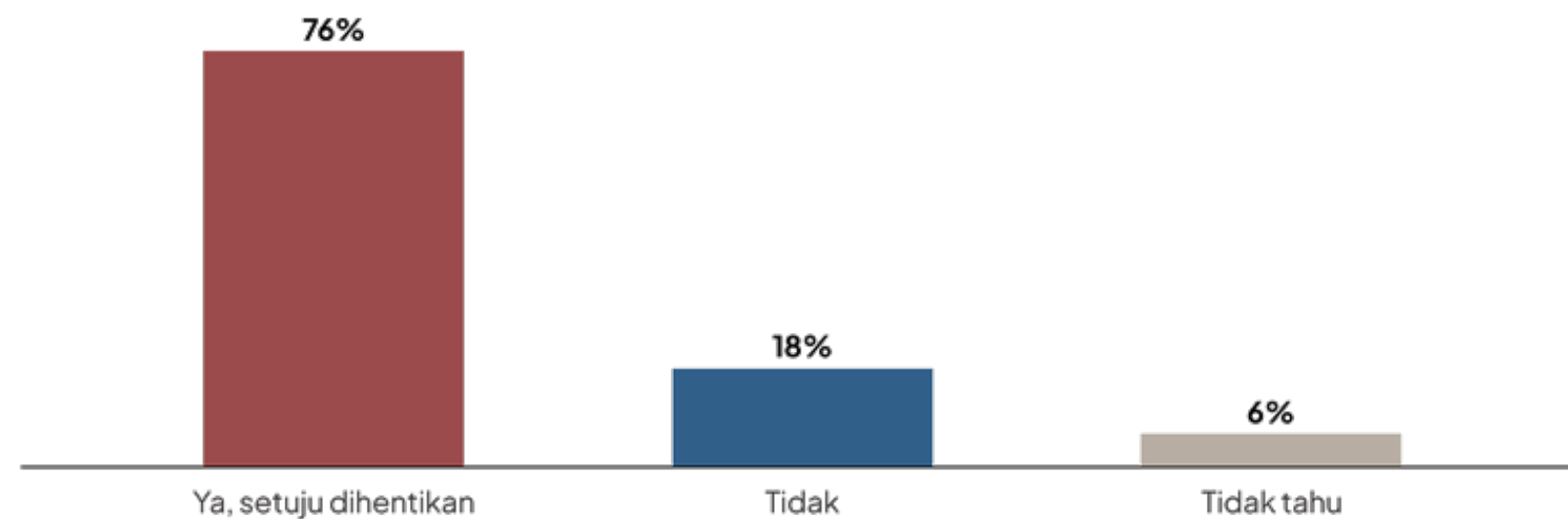
Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Sejauh mana Anda menyetujui bahwa Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang dan dijalankan secara memadai untuk mencapai tujuannya?"

Opsi jawaban meliputi "Setuju", "Tidak setuju", "Sangat tidak setuju", dan "Netral, tidak setuju maupun tidak menolak".

Gambar 7

Penilaian: apakah program MBG sebaiknya dihentikan



Sumber:

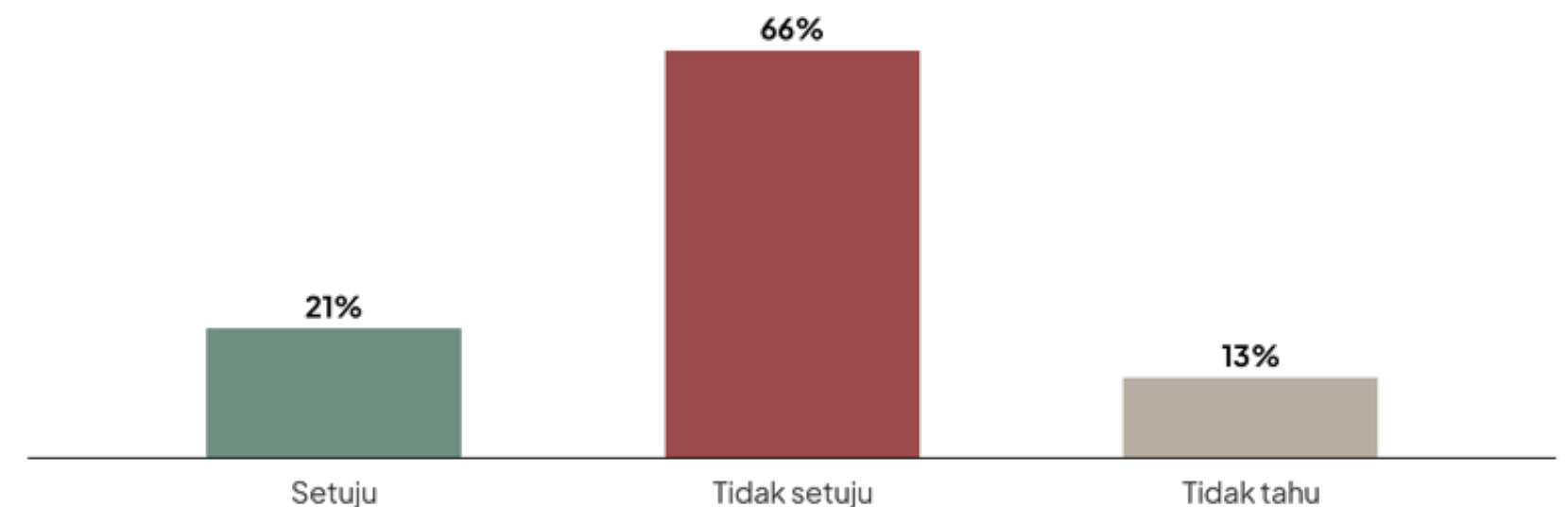
Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Apakah Anda setuju MBG dihentikan?"

Opsi jawaban meliputi "Ya, setuju dihentikan", "Tidak", dan "Tidak tahu".

Gambar 9

Pendapat tentang program Kopdes Merah Putih



Sumber:

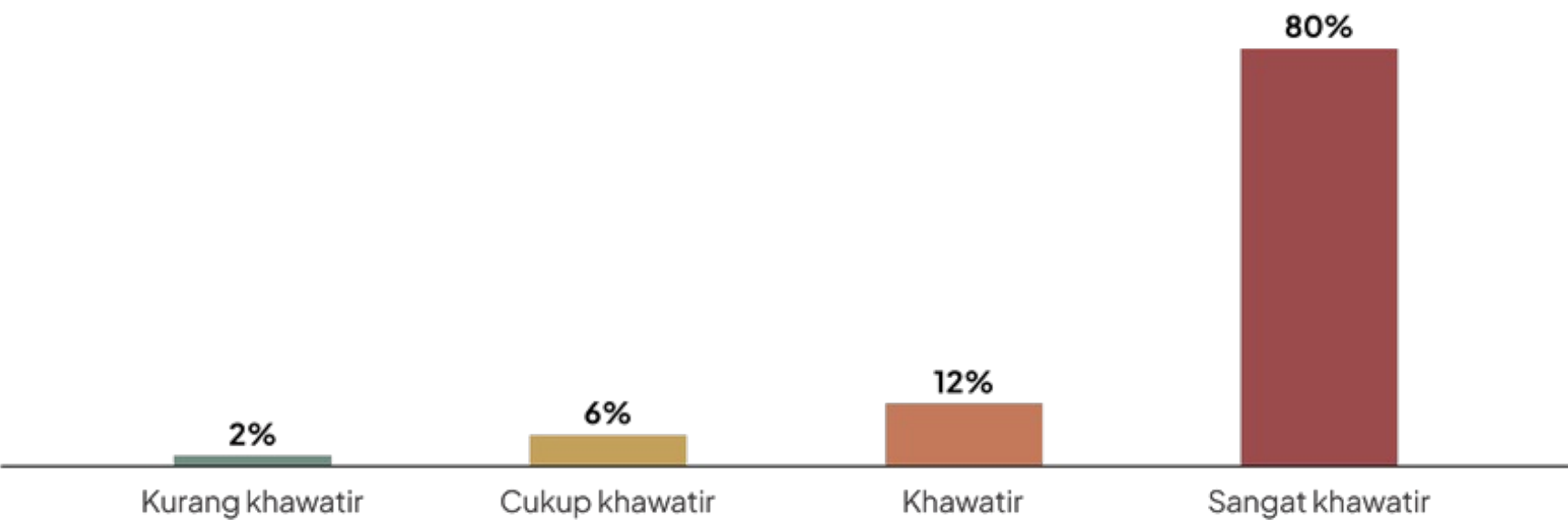
Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Bagaimana pendapat Anda tentang program Kopdes Merah Putih?"

Opsi jawaban meliputi "Setuju", "Tidak setuju", dan "Tidak tahu".

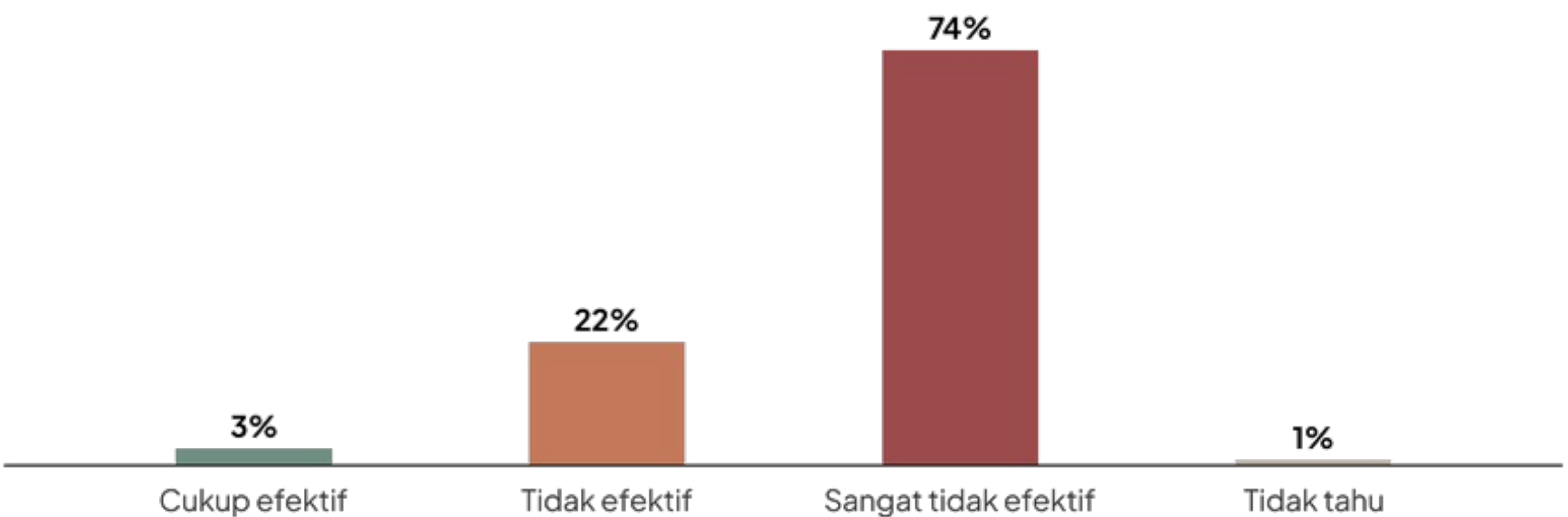
92% Ahli Khawatir terhadap arah Kebijakan, 96% Nilai Penanganan Karhutla Tidak Efektif

Gambar 10
Persepsi Ahli terhadap Arah Kebijakan Pemerintah



Sumber:
Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.
Responden ditanyakan, "Seberapa khawatir Anda terhadap arah kebijakan pemerintah?"
Opsi jawaban meliputi "Kurang khawatir", "Cukup khawatir", "Khawatir", dan "Sangat khawatir".

Gambar 11
Persepsi Ahli terhadap Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

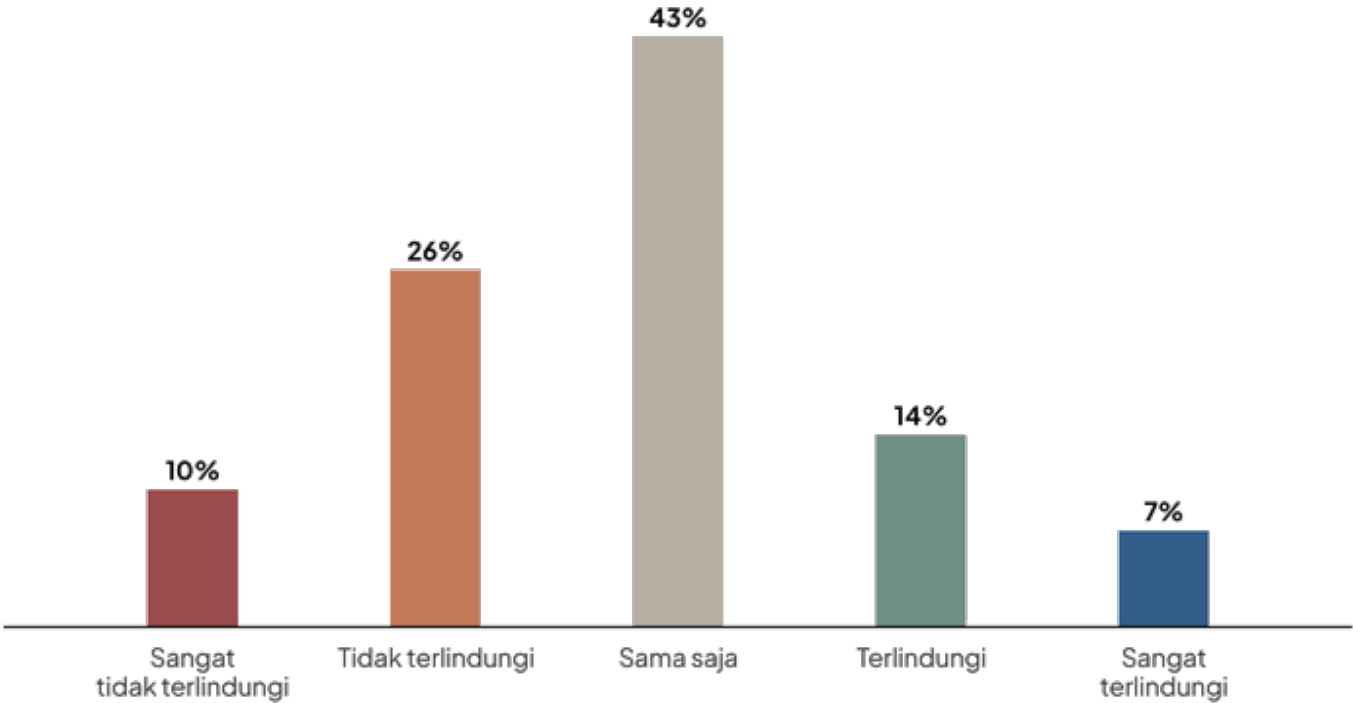


Sumber:
Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.
Responden ditanyakan, "Bagaimana Anda menilai efektivitas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh pemerintah selama dua tahun terakhir?"
Opsi jawaban meliputi "Cukup efektif", "Tidak efektif", "Sangat tidak efektif", dan "Tidak tahu".

5.2 Tata Kelola Pemerintah

Gambar 12

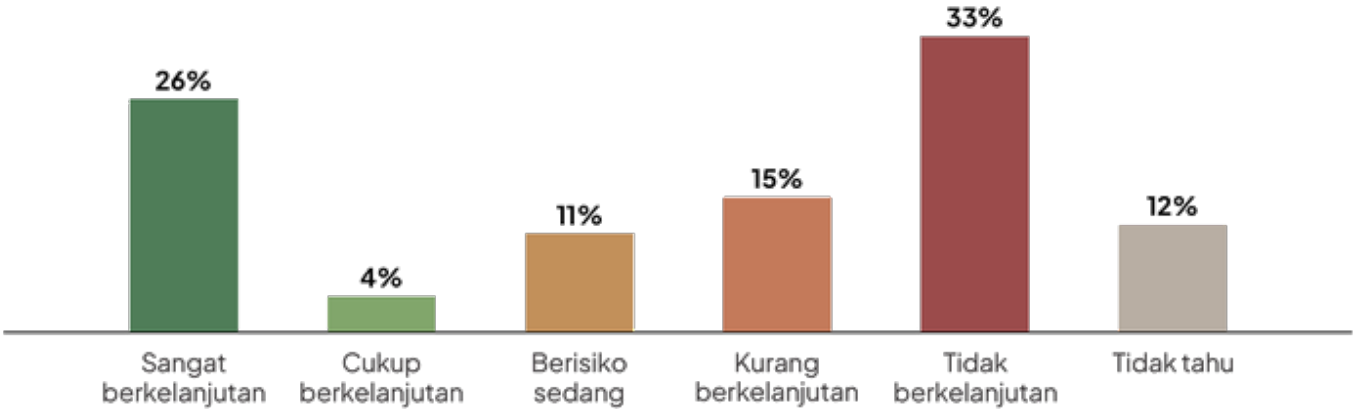
Penilaian Perlindungan Kebebasan Sipil dalam Dua Tahun Terakhir



Sumber:
Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.
Responden ditanyakan, "Bagaimana penilaian Anda terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja?"
Opsi jawaban meliputi "Sangat tidak terlindungi", "Tidak terlindungi", "sama saja", "terlindungi", dan "Sangat terlindungi".

Gambar 14

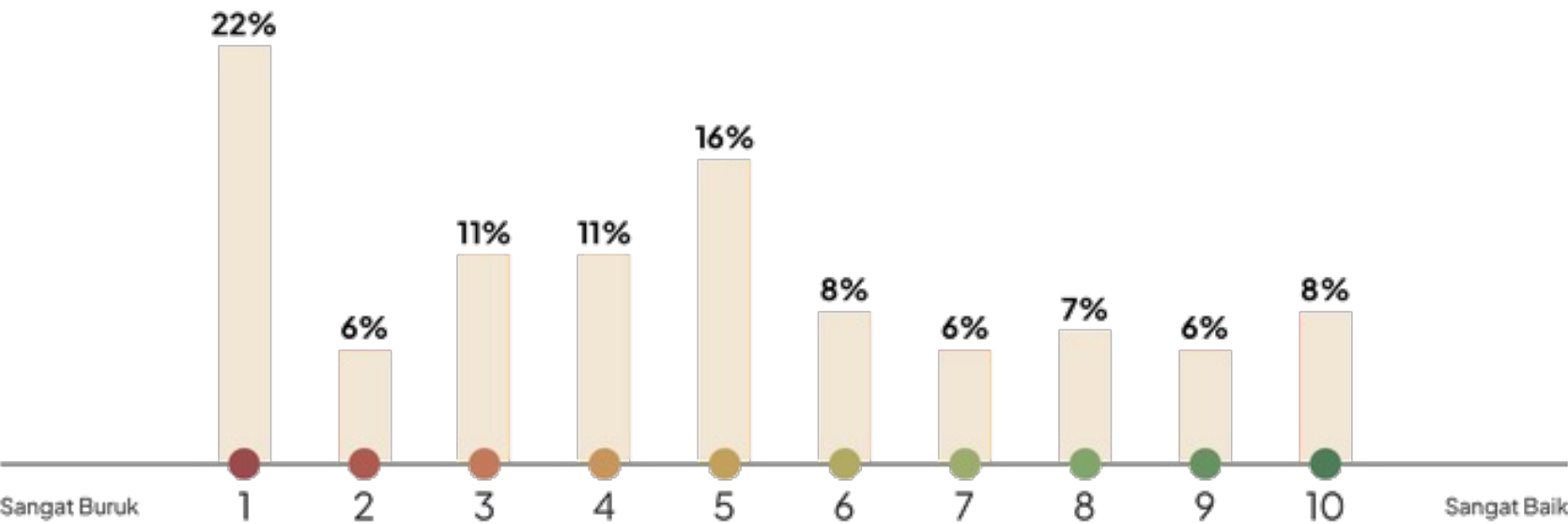
Persepsi Ahli terhadap Keberlanjutan Kebijakan Utang Pemerintah



Sumber:
Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.
Responden ditanyakan, "Bagaimana keberlanjutan kebijakan utang bagi generasi mendatang?"
Opsi jawaban meliputi "Sangat berkelanjutan", "Cukup berkelanjutan", "Kurang berkelanjutan", "Berisiko sedang", "Tidak berkelanjutan", dan "Tidak tahu".

Gambar 13

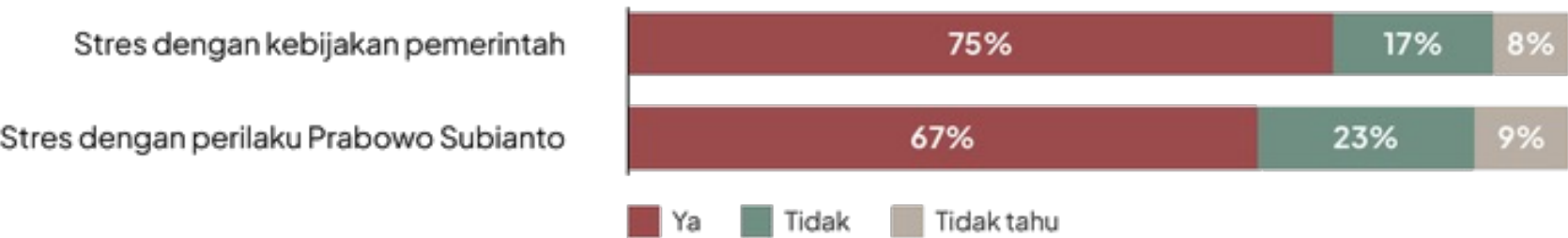
Tingkat Kepercayaan Pada Lembaga Penegak Hukum (skala 1–10)



Sumber:
Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.
Responden ditanyakan, "Bagaimana tingkat kepercayaan Anda terhadap lembaga penegak hukum (POLRI, TNI, Kejaksaan, Kehakiman, KPK, dan KPPU) di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran?"
Opsi jawaban scoring 1–10.

Gambar 15

Perasaan Stres terhadap Kebijakan Pemerintah dan Perilaku Presiden

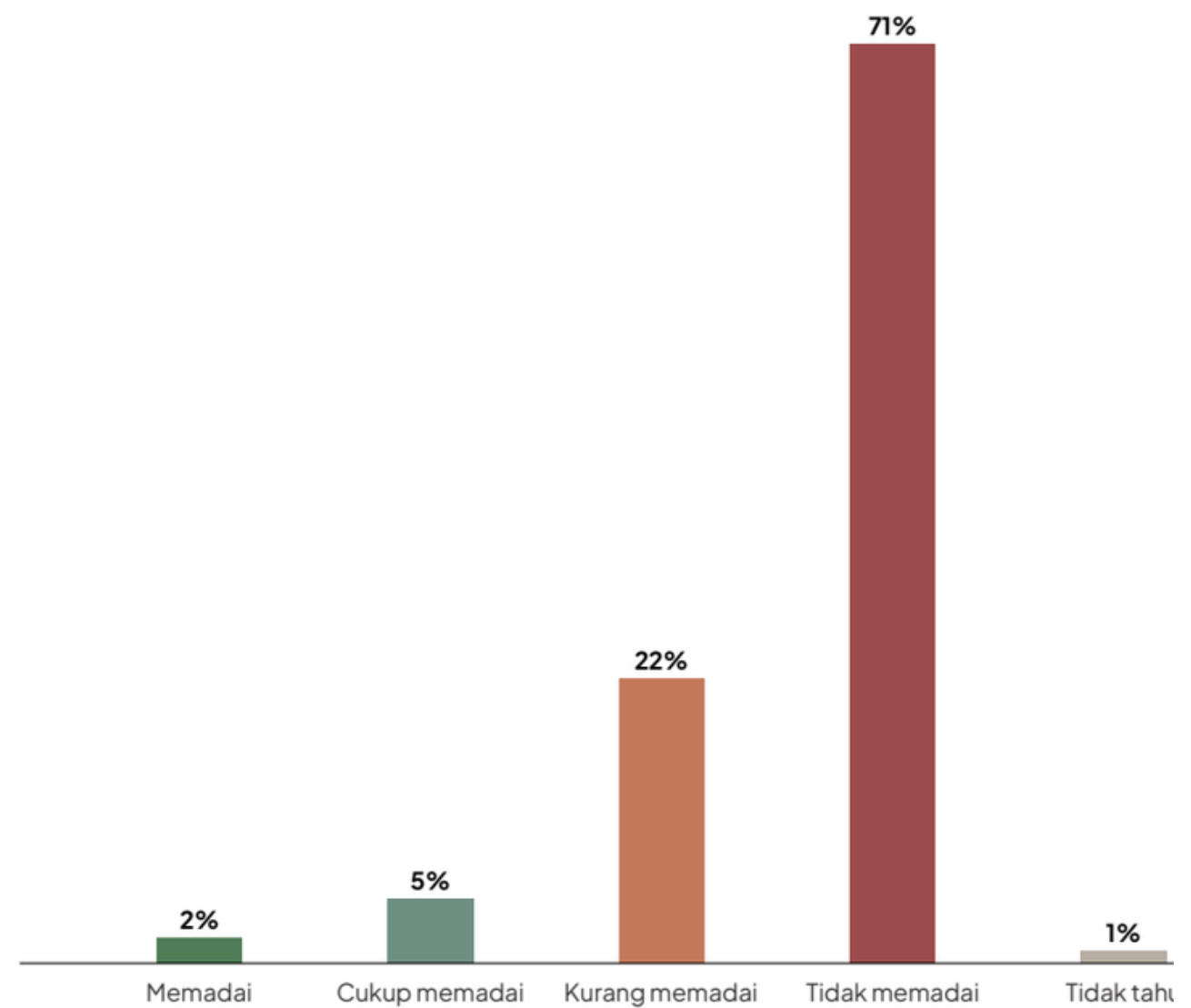


Sumber:
Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.
Responden ditanyakan, "Apakah Anda merasa stres dengan kebijakan Pemerintah?", "Apakah Anda merasa stres dengan perilaku Prabowo Subianto?"
Opsi jawaban meliputi "Ya", "Tidak", dan "Tidak tahu".

5.3 Kepemimpinan dan Komunikasi Publik

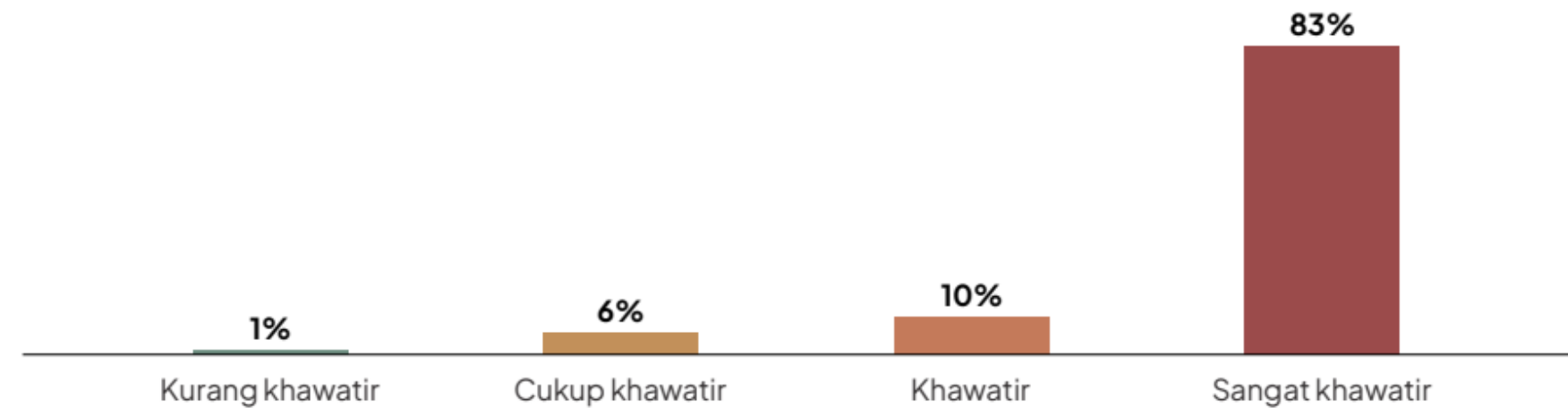
▲ Publik sangat mengkhawatirkan gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden.

Gambar 19
Persepsi Ahli terhadap Kapasitas Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto



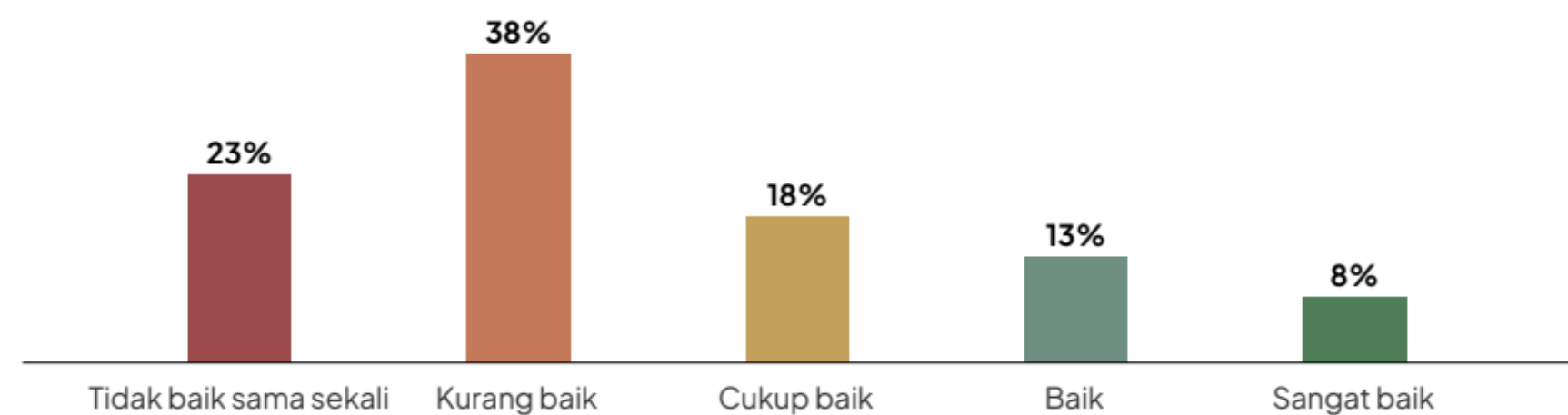
Sumber:
Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.
Responden ditanyakan, "Bagaimana Anda menilai kapasitas kepemimpinan yang ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto dalam peng- keputusan strategis selama dua tahun terakhir, sebagaimana teramati dari keputusan, kebijakan, dan tindakan publik beliau?" Opsi jawaban meliputi "Memadai", "Cukup memadai", "Kurang memadai", "Tidak memadai", dan "Tidak Tahu".

Gambar 20
Persepsi Ahli terhadap Gaya Kepemimpinan dan Komunikasi Publik Presiden



Sumber:
Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.
Responden ditanyakan, "Seberapa besar tingkat kekhawatiran Anda terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden Prabowo Subianto?" Opsi jawaban meliputi "Kurang khawatir", "Cukup khawatir", "Khawatir", dan "Sangat khawatir".

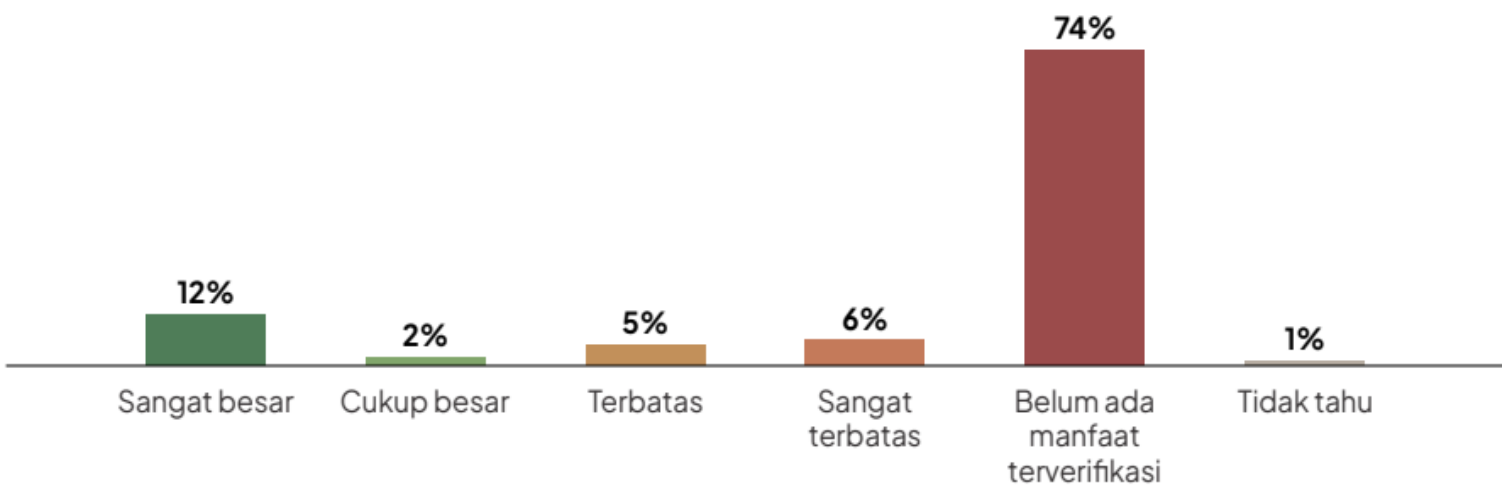
Gambar 23
Penilaian Kondisi Fisik dan Mental Presiden untuk Memimpin



Sumber:
Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.
Responden ditanyakan, "Apakah menurut Anda kondisi fisik dan mental Presiden Prabowo Subianto saat ini masih cukup baik untuk memimpin negara dan mengambil keputusan strategis?" Opsi jawaban meliputi "Tidak baik sama sekali", "Kurang baik", "Cukup baik", "Baik", dan "Sangat baik".

Gambar 21

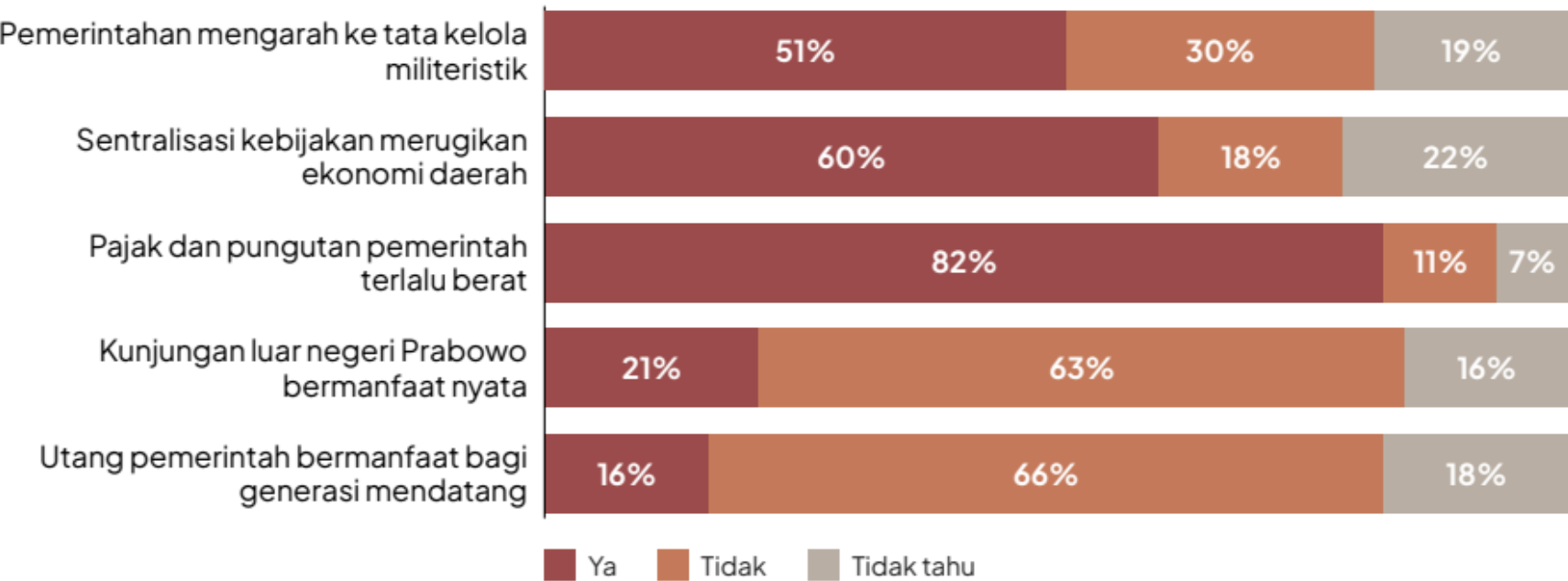
Persepsi Ahli terhadap Manfaat Diplomasi dan Kunjungan Luar Negeri Presiden



Sumber:
Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.
Responden ditanyakan, "Seberapa besar manfaat terverifikasi dari diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden?"
Ops jawaban meliputi "Sangat besar", "Cukup besar", "Sangat terbatas", "Terbatas", "Belum ada manfaat terverifikasi", dan "Tidak tahu".

Gambar 22

Penilaian Lima Pernyataan Kebijakan Pemerintah

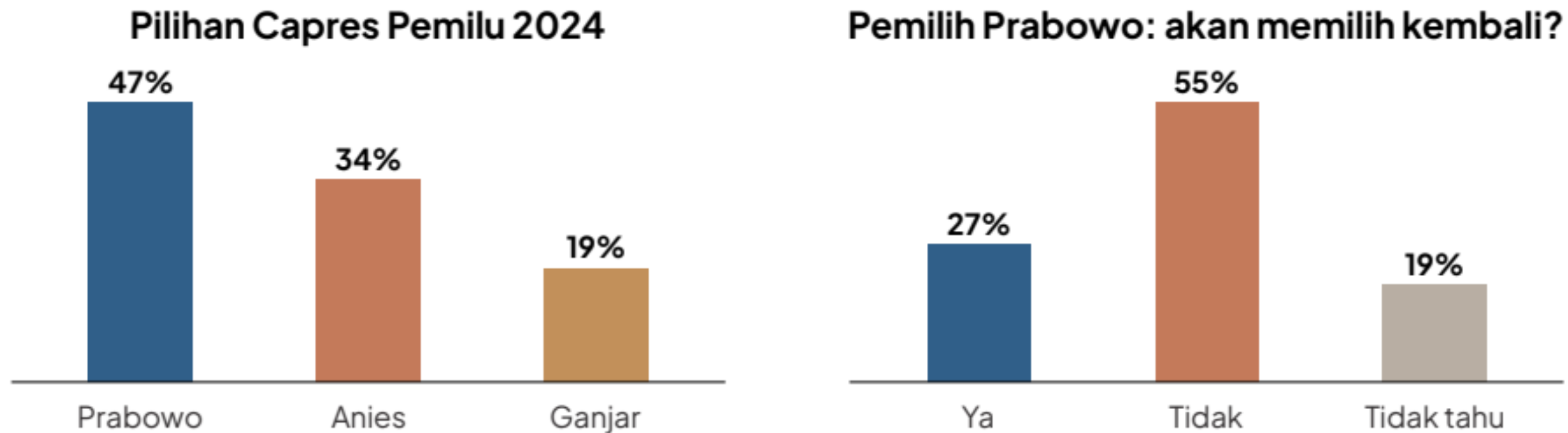


Sumber:
Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.
Responden ditanyakan, "Apakah menurut Anda Prabowo-Gibran mendorong tata kelola pemerintahan ke arah militeristik?", "Apakah menurut Anda sentralisasi kebijakan Prabowo merugikan ekonomi daerah?", "Apakah kunjungan luar negeri Prabowo telah membawa manfaat yang nyata bagi rakyat Indonesia?", "Apakah utang yang dibuat oleh pemerintah hari ini memberikan manfaat bagi generasi mendatang?".

Secara keseluruhan, responden lebih banyak melihat beban dan risiko daripada manfaat dari berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai. Pola ini tercermin dalam kekhawatiran terhadap arah tata kelola, dampak kebijakan terhadap ekonomi daerah, beban fiskal masyarakat, serta manfaat kebijakan bagi kepentingan jangka panjang.

Pilihan 2024 dan Niat Memilih Kembali Pemilih Prabowo

▲ Artinya, lebih dari separuh responden yang sebelumnya memilih Prabowo menyatakan tidak akan kembali memberikan suaranya kepada Prabowo pada Pilpres mendatang.



Sumber:

Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Siapa calon presiden yang Anda pilih pada Pemilu 2024?".

Jika memilih Prabowo, maka akan dilanjutkan pertanyaan: "Jika Anda memilih Prabowo pada Pemilu 2024, setelah melihat kinerja 2 tahun terakhir, apakah Anda akan memilihnya kembali jika pemilu diadakan sekarang?"

Opsi jawaban meliputi "Ya", "Tidak", dan "Tidak tahu".

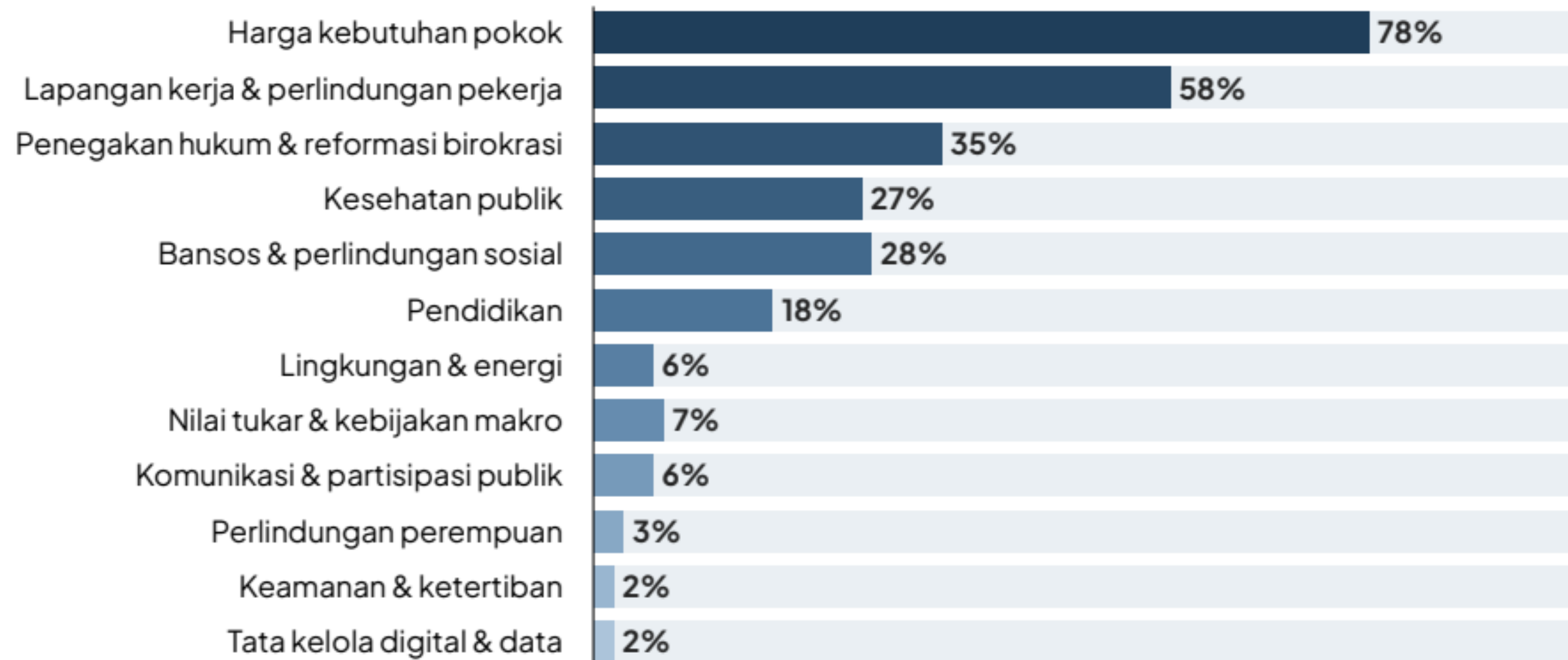
6

Pesan Untuk Prabowo Subianto



Persoalan Utama di Masyarakat

Tiga Masalah Utama yang Harus Segera Diperbaiki Pemerintah



Sumber:

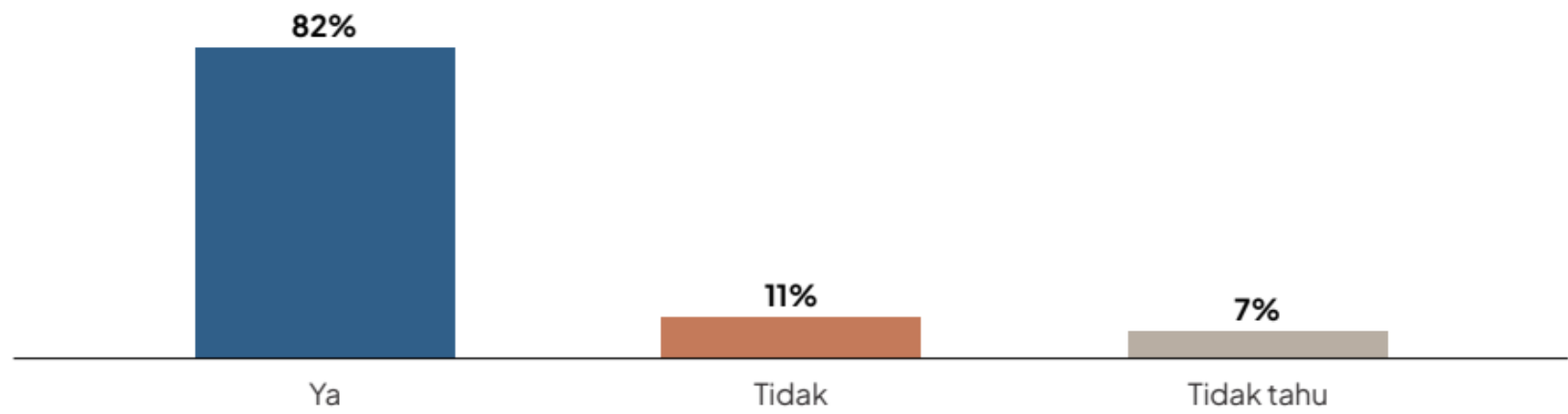
Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Apakah Anda merasa stres dengan kebijakan Pemerintah?", "Apakah Anda merasa stres dengan perilaku Prabowo Subianto?"
Opsi jawaban meliputi "Ya", "Tidak", dan "Tidak tahu".

Kinerja Pemerintah dan Dampaknya pada Masyarakat

Gambar 25

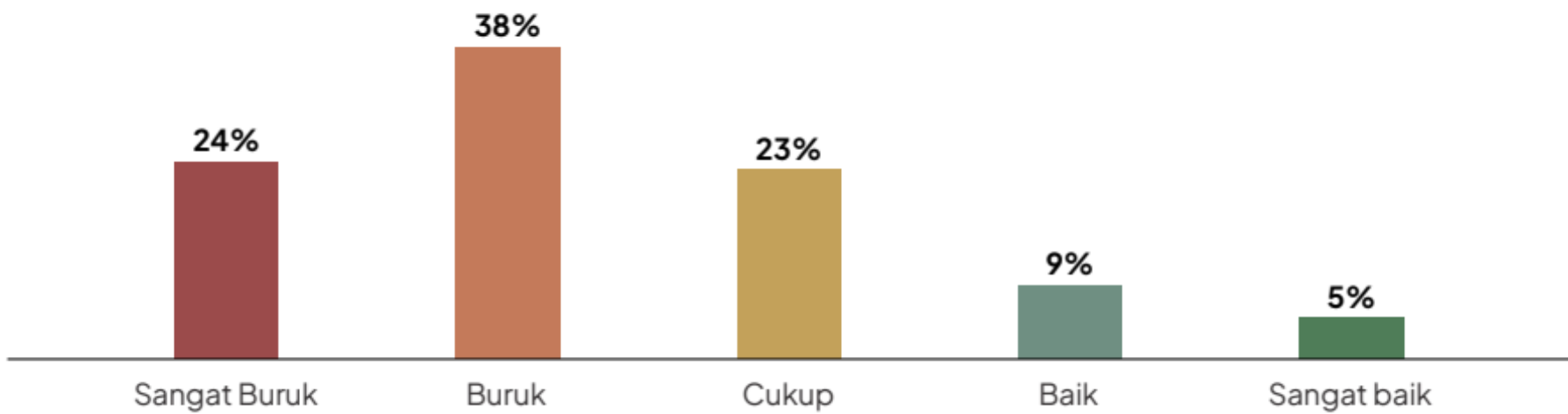
Persepsi Masyarakat terhadap Pajak dan Pungutan Pemerintah



Sumber:
Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.
Responden ditanyakan, "Apakah Anda merasa pajak dan pungutan pemerintah saat ini terlalu berat?"
Opsi jawaban meliputi "Ya", "Tidak", dan "Tidak tahu".

Gambar 26

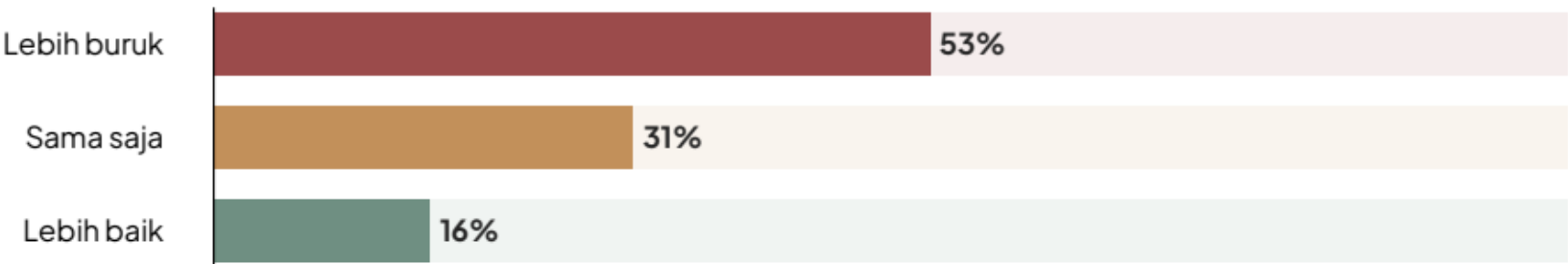
Penilaian Kebijakan Mengatasi Pengangguran dan Membuka Lapangan Kerja



Sumber:
Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.
Responden ditanyakan, "Bagaimana penilaian Anda terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja?"
Opsi jawaban meliputi "Sangat buruk", "Buruk", "Cukup", "Baik", dan "Sangat baik".

Gambar 27

Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Dibandingkan Setahun Lalu



Sumber:
Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.
Responden ditanyakan, "Apakah Anda merasa stres dengan kebijakan Pemerintah?", "Apakah Anda merasa stres dengan perilaku Prabowo Subianto?"
Opsi jawaban meliputi "Ya", "Tidak", dan "Tidak tahu".

▲ Artinya jumlah rumah tangga yang ekonominya memburuk lebih dari tiga kali lipat dibandingkan yang membaik.

Rekomendasi Koreksi Arah Kebijakan Pemerintah

1

Hentikan pemotongan Dana Desa demi kepentingan KDMP

PMK No. 7/2026 memangkas 58,03% pagu Dana Desa (Rp34,57 triliun) untuk KDMP. Kembalikan Dana Desa sebagai instrumen kedaulatan fiskal desa.

2

Wujudkan Zaken Kabinet, bukan bagi-bagi kekuasaan

Reshuffle berbasis evaluasi kinerja dan meritokrasi, bukan kompromi elite. Gabungkan kementerian/lembaga yang fungsinya tumpang tindih.

3

Segera terapkan Pajak Kekayaan bagi orang super kaya

Pajak 1–2% atas kekayaan di atas Rp84 miliar dapat menambah penerimaan hingga Rp142,2 triliun per tahun.

4

Hentikan cara berutang secara agresif

Beban bunga utang Rp599,4 triliun sudah melampaui belanja kesehatan Rp247,3 triliun. Pangkas program boros, tempuh debt cancellation dan debt swap.

5

Ganti indikator ekonomi dengan happiness index dan planetary boundary

Kerugian akibat Karhutla Rp123,1 triliun dan banjir Sumatera Rp68,6 triliun (CELIOS, 2026). Jadikan Doughnut Economy acuan arah kebijakan.

6

Ciptakan lapangan kerja yang adil dan berkualitas

51,5% pengangguran adalah usia muda (BPS, 2025). Kembalikan rekrutmen berbasis merit dan pulihkan industrialisasi padat karya.

7

Mencari Pemimpin Masa Depan



7 Mencari Pemimpin Masa Depan

Kriteria Calon Pemimpin Nasional pada Pemilu 2029 Menurut Ahli



Sumber:

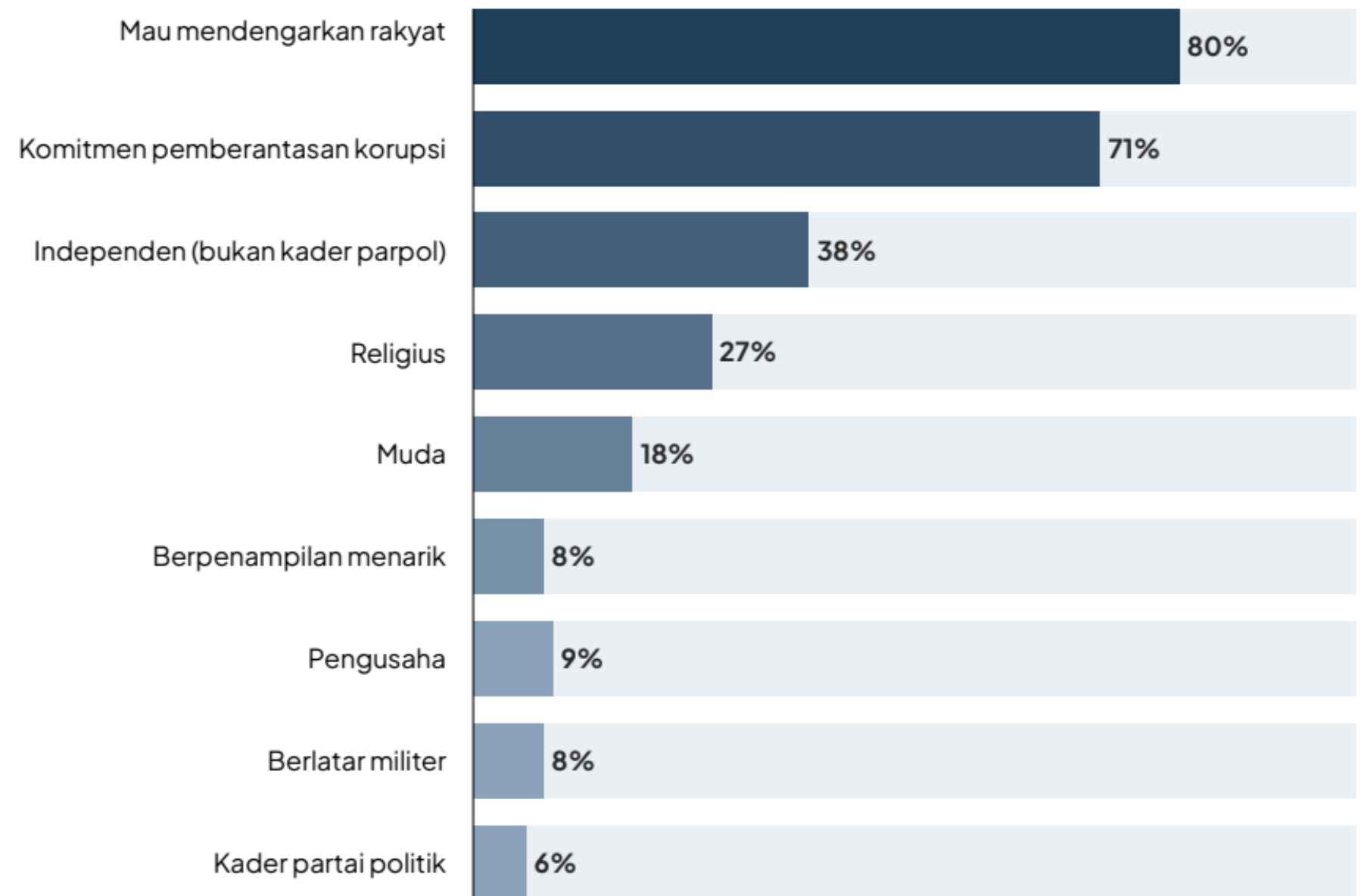
Survei Ahli, N = 129, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Menurut Anda, kriteria apa yang paling penting dimiliki oleh calon pemimpin nasional Indonesia pada Pemilihan Umum 2029? Pilih paling banyak tiga kriteria".

Opsi jawaban meliputi "Rekam jejak kebijakan yang terukur", "Kompetensi teknokratik dan penguasaan substansi kebijakan", "Komitmen pada pemberantasan korupsi", "Komitmen pada demokrasi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia", "Kesediaan mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat", "Berlatar belakang militer", "Berlatar belakang dunia usaha", "Kader partai politik", "Independen, bukan kader partai politik", "Berusia muda", "Ketaatan menjalankan ajaran agama", "Kemampuan tampil dan berkomunikasi di hadapan publik", dan "Kriteria lainnya".

Masyarakat Umum:

Kriteria Pemimpin Masa Depan Indonesia Tahun 2029



Sumber:

Survei Masyarakat Umum, N = 1.142, diolah oleh peneliti.

Responden ditanyakan, "Menurut Anda, apa kriteria pemimpin masa depan Indonesia tahun 2029?" Opsi jawaban meliputi "Mau mendengarkan rakyat", "Komitmen pemberantasan korupsi", "Independen (bukan kader parpol)", "Religius", "Muda", "Berpenampilan menarik", "Pengusaha", "Berlatar militer", dan "Kader partai politik".

Rapor Kinerja Sektor - Kabinet Bayangan

Catatan Evaluasi Wali Kelas

Selama 2 Tahun Bekerja

Arti skor 1-10 Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih versi Kabinet Bayangan

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Ananda diragukan ijazah sekolah sebelumnya | 6 | Ananda perlu mendengarkan orang lain agar tidak merasa paling benar |
| 2 | Ananda tidak layak jadi pemimpin negara | 7 | Ananda memiliki kemampuan tapi bisa lebih baik kinerjanya |
| 3 | Ananda terlalu sering mencontek | 8 | Ananda menunjukkan bakat memimpin |
| 4 | Ananda lupa belajar karena terlalu sering keluar negeri | 9 | Ananda sangat layak menjadi ketua kelas |
| 5 | Ananda dinyatakan tidak lulus memimpin negeri ini | 10 | Ananda adalah sosok yang nyaris sempurna |

Menteri Sekretaris Negara

Menteri Kabinet Bayangan



Feri Amsari

Menteri Kabinet Merah Putih



Prasetyo Hadi
(Mensesneg)

Nilai

3/10



Listyo Sigit Prabowo
(Kepala Staf
Kepresidenan,
sejak 1 Okt 2026;
menggantikan
Dudung
Abdurachman)

Nilai

3/10



Muhammad Qodari
(Kepala Badan
Komunikasi
Pemerintah)

Nilai

3/10

Apa yang Menjadi Masalah?

- 1 Kewenangan antarlembaga belum tertata, sehingga masih tumpang tindih.
- 2 Administrasi istana terlalu birokratis.
- 3 Komunikasi istana terlalu banyak pintu.
- 4 Istana tidak terbuka dan tidak profesional dalam membentuk peraturan perundang-undangan.
- 5 Cara istana menampung aspirasi publik buruk.
- 6 Kebijakan tidak terbuka, dan tindakan pemerintah tidak menyentuh kesejahteraan publik serta hak warga negara.

Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?

- 1 Membiarkan setiap lembaga bekerja serabutan, tanpa tata kelola yang benar.
- 2 Mensesneg tidak mampu mengelola penyelenggaraan negara dengan baik, karena pelanggarnya adalah Presiden sendiri.

Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?

- 1 Kebijakan tidak berdasarkan UUD, UU, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Program dijalankan tanpa uji coba (*piloting*) dan tanpa alat ukur ilmiah yang tegas: Bappenas tidak dilibatkan, kebijakan yang dituangkan dalam UU tidak disertai naskah akademik, dan kebijakan serta tindakan Presiden atas programnya tidak berbasis UU dan partisipasi publik. Keputusan diambil tiba-tiba dan tidak tercantum dalam program pembangunan nasional.

Solusi yang Seharusnya Dilakukan

- 1 Presiden harus taat kepada konstitusi, hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim

Menteri Kabinet Bayangan



Iqbal Damanik

Menteri Kabinet Merah Putih



Moh. Jumhur Hidayat

(Menteri LH/ Kepala BPLH)

Nilai
3/10



Bahlil Lahadalia

(Menteri ESDM; sejak 1 Okt 2026 juga Menko Hilirisasi dan Transisi Energi)

Nilai
3/10



Raja Juli Antoni

(Menteri Kehutanan)

Nilai
3/10



Nusron Wahid

(Menteri ATR/ Kepala BPN)

Nilai
3/10

Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
1 Komitmen pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) rendah. 2 Indonesia terjebak ketergantungan pada energi fosil (<i>carbon lock-in</i>). 3 Proyek transisi energi mengabaikan keadilan, kesetaraan, dan inklusi sosial. 4 Proyek pemerintah memicu konflik lahan yang melanggar hak masyarakat adat.	1 Mengabaikan peringatan El Nino dan kemarau panjang dari BMKG dan Kemenkes, lalu baru bereaksi setelah karhutla terjadi: menerbitkan Inpres No. 11/2026 (31 Agustus 2026), mengerahkan modifikasi cuaca, water bombing, helikopter, dan pesawat, meminta inovasi “ubi bombing” (tepung singkong pengganti air), serta menetapkan 138 tersangka (per 7 September 2026). 2 Merespons gejolak Selat Hormuz dengan	1 Penanganannya hanya kuratif, padahal karhutla sudah berulang lebih dari 20 tahun. Tanpa mitigasi, area terbakar meluas; asapnya merusak kesehatan warga dan satwa, memperparah krisis iklim, dan mengancam target FOLU Net Sink 2030. Kerugian ekonominya mencapai Rp121,1 triliun (Celios, 2026). 2 B50 hanya memindahkan krisis: butuh tambahan CPO hingga ±16 juta ton/tahun (dari 12 juta ton di B40),	1 Menyusun strategi pencegahan karhutla, karena Inpres hanya mengikat internal pemerintah dan tidak cukup kuat menjerat korporasi. Data tersangka dan proses hukumnya perlu dibuka ke publik, disertai investasi pada teknologi dan riset penanggulangan karhutla. 2 Menuangkan komitmen lepas dari energi fosil dalam regulasi yang mengikat dan konsisten hingga tingkat teknis, karena PLN dan pemerintah masih mencari

Menteri Pendidikan & Kebudayaan

Menteri Kabinet Bayangan



Iman Zanatul Haeri

Menteri Kabinet Merah Putih



Abdul Mu'ti
(Mendikdasmen)

Nilai

6/10



Brian Yulianto
(Mendiktisaintek)

Nilai

4/10



Fadli Zon
(Menteri Kebudayaan)

Nilai

5/10



Sugiono
(Menko PMK, sejak 1 Okt 2026; menggantikan Pratikno)

Nilai

2/10

Apa yang Menjadi Masalah?

- 1 Kualitas pembelajaran.
- 2 Alokasi anggaran pendidikan.
- 3 Biaya pendidikan.
- 4 Kesejahteraan dan kompetensi guru & dosen.
- 5 Sistem pendidikan dan pembagian kewenangan pusat-daerah.

Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?

- 1 Membagikan TV interaktif (*Interactive Flat Panel*) ke sekolah.
- 2 Mengalokasikan anggaran pendidikan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan sekolah khusus (Sekolah Rakyat, SMA Unggul Garuda, Sekolah Nasional Terintegrasi).
- 3 Mengandalkan KIP, PIP, beasiswa, dan penetapan penerima berdasarkan desil.
- 4 Mengangkat PPPK paruh waktu dan memberi bantuan insentif untuk guru non-ASN.
- 5 Menarik urusan pendidikan ke pusat (sentralisasi).

Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?

- 1 Tidak sesuai kebutuhan. Kebutuhan dasar justru belum terpenuhi: sumber belajar dan buku perpustakaan, ketersediaan guru (terutama di daerah 3T), peningkatan kualitas guru, dan fasilitas pendidikan yang layak.
- 2 Kebutuhan dasar pendidikan terabaikan: dana BOS tidak lagi sesuai standar pembiayaan, MBG menimbulkan kasus keracunan, dan gaji guru (PNS, PPPK, PPPK paruh waktu, honorer) makin kecil. Sekolah Rakyat, SMA Unggul Garuda, dan SNT dirancang tanpa kajian kebutuhan dan tidak mengacu pada RPJMN-RPJPN, sehingga tata kelola pendidikan jadi multisistem.

Solusi yang Seharusnya Dilakukan

- 1 Perbaiki kesejahteraan guru, dosen dan tenaga pendidik. Memastikan fasilitas belajar secara merata di seluruh Indonesia sehingga akses pendidikan gratis terbuka lebar untuk semua anak Indonesia. Memiliki ukuran yang jelas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perbaikan kesejahteraan guru, pelatihan dan beragam intervensi untuk meningkatkan kompetensi guru dan dosen serta kualitas pembelajarannya. Menyediakan guru dan dosen berkualitas secara merata di seluruh Indonesia termasuk daerah 3T. Membuat labotarium sekolah

Menteri Perekonomian

Menteri Kabinet Bayangan



Media Wahyudi Askar

Menteri Kabinet Merah Putih



Airlangga Hartarto
(Menko Perekonomian)

Nilai
3/10



Rosan Roeslani
(Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM; CEO Danantara)

Nilai
3/10



Ferry Juliantono
(Menteri Koperasi)

Nilai
3/10



Maman Abdurrahman
(Menteri UMKM)

Nilai
3/10



Budi Santoso
(Menteri Perdagangan)

Nilai
4/10



Dony Oskaria
(Kepala BP BUMN; COO Danantara)

Nilai
3/10



Widiyanti Putri Wardhana
(Kepala BP BUMN; COO Danantara)

Nilai
3/10



Muhammad Sarmuji
(Menteri Perindustrian, sejak 1 Okt 2026; menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita)

Nilai
N/A



Teuku Riefky Harsya
(Menteri Ekonomi Kreatif)

Nilai
4/10

Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
1 Menko Perekonomian: AS mengancam tarif impor 32% 2 Investasi dan Hilirisasi: investasi besar, tetapi lapangan kerja yang tercipta sedikit. 3 Koperasi: ekonomi desa lemah dan rantai distribusi panjang. 4 UMKM: banyak kredit macet dan sulit memperoleh kredit baru. 5 Perdagangan: ekspor komoditas rawan <i>under-invoicing</i>; impor tumbuh 19,94%, sementara ekspor hanya 4,43%. 6 BP BUMN: ratusan BUMN kecil tidak efisien dan sejumlah BUMN besar terus merugi. 7 Pariwisata: wisatawan menumpuk di Bali (46% wisman) dan belanja per wisatawan rendah.	1 Meneken ART pada 19 Februari 2026: tarif 19% ditukar dengan bea nol untuk 99% produk AS, penghapusan TKDN bagi perusahaan AS, dan penyesuaian standar ke aturan AS. 2 Memusatkan pengelolaan aset dan dividen BUMN di Danantara, sekaligus memperluas peran Danantara sebagai investor lewat berbagai proyek dan konsolidasi aset. 3 Membentuk sekitar 83.380 koperasi dari atas. Setiap unit boleh berutang hingga Rp3 miliar ke Himbara, dengan cicilan dipotong dari Dana Desa. 4 Menjanjikan hapus tagih kredit macet bagi satu juta debitur. 5 Mengalihkan ekspor batu bara, sawit, dan ferroalloy ke PT Danantara	1 Daya saing produk dalam negeri turun karena instrumen untuk melindungi dan memperkuat industri domestik ikut dilemahkan. 2 Uang rakyat dipindahkan dari kas negara ke kendaraan investasi, dan risiko keputusan investasinya ikut pindah dari mekanisme APBN ke neraca Danantara. 3 Baru sekitar 4% koperasi yang berjalan. Sekitar dua pertiga Dana Desa terikat cicilan selama enam tahun, dan desa termiskin justru mencatat transaksi terendah. 4 Realisasinya hanya sekitar 67.000 debitur. Kredit UMKM hanya tumbuh 2,38%, sementara NPL UMKM naik menjadi 4,62%. 5 Jika DSI menjadi pembeli, risiko harga berpindah ke negara dan rantai	1 Membatalkan kesepakatan ART. 2 Menerapkan larangan dana publik menanggung kerugian (<i>public money first-loss prohibition</i>): Danantara tidak boleh memakai aset publik untuk menyelamatkan investasi gagal tanpa persetujuan DPR. Sebagian hasil investasi otomatis kembali ke APBN dengan formula tetap, bukan keputusan tahunan. Pisahkan pemilik aset, regulator, dan pengelola investasi agar kekuasaan tidak menumpuk di satu lembaga, dan segera terbitkan laporan tahunan. 3 Menghentikan KDMP dan membangun pendekatan ekonomi berbasis kemandirian desa. 4 Mengembangkan kredit tanpa agunan berbasis data transaksi digital

Menteri Keuangan & Tata Kelola Anggaran

Menteri Kabinet Bayangan



Bhima Yudhistira Adhinegara

Menteri Kabinet Merah Putih



Suahasil Nazara

(Menkeu, sejak 14 Sep 2026; menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu saat kebijakan di kolom G diambil)

Nilai

5/10

Apa yang Menjadi Masalah?

- 1 Kemampuan membayar utang melemah.
- 2 Perencanaan belanja buruk.
- 3 Rasio pajak rendah.
- 4 Efisiensi anggaran daerah justru kontraproduktif.
- 5 Pengambilalihan utang kereta cepat Whoosh.
- 6 Insentif pajak boros dan tidak tepat sasaran.

Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?

- 1 Menambah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) global.
- 2 Menggeser anggaran di tengah tahun berjalan.
- 3 Mengganti skema PPh UMKM dan "berburu di kebun binatang" (mengejar pajak dari wajib pajak yang sudah ada).
- 4 Pemerintah pusat memberi bantuan dana ke pemda.
- 5 Membayar utang Whoosh dengan APBN.
- 6 Menambah insentif pajak untuk hilirisasi tanpa evaluasi.

Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?

- 1 Pembayaran bunga utang sudah menyedot 24% penerimaan pajak, dan tren suku bunga makin tinggi. Ruang fiskal makin sempit, sementara pemerintah makin bergantung pada surat utang, yang mencapai 88% dari total utang, sebagai sumber utama pembiayaan defisit.
- 2 Demi membiayai program prioritas seperti MBG dan Kopdes Merah Putih, pemerintah menggeser APBN tanpa persetujuan DPR. Ini bertentangan dengan Putusan MK No. 100/PUU-XXIV/2026, yang menegaskan pergeseran alokasi anggaran harus dibahas terbuka

Solusi yang Seharusnya Dilakukan

- 1 Hentikan program MBG dan Kopdes MP.
- 2 Lakukan renegotiasi utang termasuk *debt swap* dan *debt cancellation* (penghapusan utang).
- 3 Kembalikan aturan PPh Final UMKM 0,5% dan turunkan PPN dari 11% ke 8%.
- 4 Utang kereta cepat diselesaikan dengan penghapusan utang bukan menggeser beban ke APBN.
- 5 Pertajam insentif fiskal ke industri padat karya dan cegah kebocoran pajak di hilirisasi mineral.

Menteri Riset, Teknologi & Digital

Menteri Kabinet Bayangan



Nenden Sekar Arum

Menteri Kabinet Merah Putih



Brian Yulianto
(Mendiktisaintek)

Nilai
6/10



Meutya Hafid
(Menteri Komunikasi dan Digital)

Nilai
4/10

Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
1 Judi online dan penipuan digital. 2 Keamanan data rentan. 3 Aturan penggunaan AI.	1 Memblokir situs dan akun judol, serta mewajibkan registrasi kartu SIM dengan biometrik/pengenaan wajah. 2 Menyusun aturan turunan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan mengimbau warga, misalnya membatasi pengambilan foto/video di ruang publik. 3 Menerbitkan peta jalan dan pedoman etika AI. 4 Moderasi konten berlebihan, pemantauan otomatis lewat mesin AIS, dan permintaan penurunan konten (take-down) besar-besaran. 5 Mewajibkan verifikasi usia pengguna media sosial/PSE.	1 Blokir situs hanya bersifat reaktif dan tidak efektif di dunia digital yang terus berubah. Cara ini menghabiskan sumber daya, tetapi tidak menyentuh bandar besar, jaringan payment gateway, dan pencucian uangnya. Kewajiban data biometrik juga memperluas pengawasan massal tanpa jaminan keamanan. 2 UU PDP seharusnya berlaku penuh sejak akhir 2024, tetapi jadi aturan pasif karena Lembaga Pengawas PDP yang independen tak kunjung dibentuk. Akibatnya, tidak ada lembaga yang berwenang memberi sanksi. Komdigi malah melempar beban keamanan data ke warga (misalnya imbauan tidak	1 Hentikan pengawasan biometrik dan pemblokiran situs reaktif dan alihkan fokus pada pemblokiran infrastruktur finansial (follow the money) serta pembekuan payment gateway bersama OJK/PPATK. 2 Segera resmikan Otoritas Pengawas PDP independen agar bisa menjatuhkan sanksi hukum, serta wajibkan audit berkala pada infrastruktur kritis negara alih-alih menyalahkan warga. 3 Terbitkan hukum mengikat berbasis tingkat risiko (risk-based regulation) dan fasilitasi regulatory sandbox agar aturan hukum mengikat tanpa mematikan inovasi

Menteri Kesehatan

Menteri Kabinet Bayangan



Irma Hidayana

Menteri Kabinet Merah Putih



Budi Gunadi
Sadikin
(Menkes)

Nilai
3/10

Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
1 Kritik dibungkam. Siapa saja, baik dari nakes, guru besar bidang kesehatan, maupun siapa saja yang mengkritik Menkes. 2 UU Kesehatan (Omnibus Law) No. 17/2023 membawa kemunduran berantai di sektor kesehatan, misalnya sentralisasi pengadaan, perpanjangan izin praktik nakes/nadis, pendidikan nakes/nadis, dan kolegium kedokteran. 3 Perlindungan kesehatan (BPJS) untuk pasien dan nakes lemah. 4 Terlalu banyak gimik dan meninggalkan kebijakan kesehatan masyarakat yang berbasis bukti.	1 Tidak ada. Kemenkes justru membungkam kritik secara formal, misalnya dengan mencopot jabatan sejumlah dokter.	1 Pemerintah ingin menguasai semua lini sektor kesehatan lewat aturan yang membatasi kebebasan individu, organisasi profesi, dan kolegium. Akibatnya, seluruh ASN, PNS, dan pekerja kesehatan dipaksa patuh pada aturan yang justru merugikan mereka. 2 BGS adalah menteri titipan politik, sehingga kebijakannya lebih mementingkan kepentingan politik golongan daripada kesehatan masyarakat. Menkes juga tidak punya pendidikan formal maupun pengalaman panjang di bidang kesehatan.	1 Menkes BGS diganti dengan Menkes yang berlatar belakang pendidikan dan pengalaman mendalam di bidang kesehatan 2 Mengamandemen UU Omnibus Law Kesehatan No. 17/2023 dengan memasukkan kembali ketentuan anggaran minimal kesehatan, mengembalikan independensi kolegium, memperkuat & menyeimbangkan desentralisasi sektot kesehatan, menghapus semua ketentuan terkait privatisasi sistem kesehatan. 3 Memperkuat perlindungan nakes dan pasien juga faskes melalui dukungan anggaran dan tata kelola BPJS yang

Menteri Sosial & Layanan Dasar

Menteri Kabinet Bayangan



Nabiyla Risfa Izzati

Menteri Kabinet Merah Putih



Saifullah Yusuf
(Mensos)

Nilai
4/10



Muhaimin Iskandar
(Menko Pemberdayaan Masyarakat)

Nilai
4/10



Wihaji
(Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN)

Nilai
4/10



Yassierli
(Menaker)

Nilai
4/10



Mukhtarudin
(Menteri P2MI)

Nilai
4/10



Dody Hanggodo
(Menteri PU)

Nilai
3/10



Maruarar Sirait
(Menteri PKP)

Nilai
4/10

Apa yang Menjadi Masalah?

- 1 Isu dan program prioritas tidak jelas karena ditentukan oleh keinginan sepihak Presiden, bukan kebutuhan.
- 2 Tidak ada mekanisme oposisi, sehingga pemerintahan berjalan tanpa pengawasan.
- 3 Pemerintah anti-pakar dan anti-kritik.
- 4 Kabinet terlalu gemuk dan alokasi anggaran tidak proporsional.
- 5 Data buruk, contohnya masalah desil yang sangat memengaruhi hajat hidup orang banyak.

Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?

- 1 Kebanyakan menteri menjadi "yes man" yang menjalankan semua arahan Presiden tanpa pertimbangan, bukan mitra yang membantu Presiden memahami persoalan. Akibatnya banyak isu tidak terselesaikan, ditambah kewenangan yang tumpang tindih karena jumlah menteri terlalu banyak.

Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?

- 1 Data dan desil: tumpang tindih data tidak dibersihkan, sehingga polemik desil tak kunjung selesai.
- 2 RUU Ketenagakerjaan (Menaker): Kemnaker gagal membangun dialog yang konstruktif antar-pemangku kepentingan, sehingga partisipasi bermakna tidak tercapai dan UU terasa buru-buru disahkan demi formalitas.
- 3 Menteri P2MI: programnya tidak jelas, mungkin karena anggarannya tidak diprioritaskan.
- 4 Menteri PU: banyak kontroversi (misalnya soal mutasi), tetapi capaiannya tidak jelas.

Solusi yang Seharusnya Dilakukan

- 1 Data dan desil: jelaskan kebijakan desil kepada publik dan tunda dulu kebijakan terkait desil yang langsung merugikan warga, misalnya pencabutan bansos.
- 2 RUU Ketenagakerjaan: buka draft UU Perlindungan Ketenagakerjaan, libatkan pemangku kepentingan dan jangan hanya mengejar target waktu tanpa partisipasi bermakna.

Menteri Hak Perempuan & Kelompok Marginal

Menteri Kabinet Bayangan



Khoirunnisa Nur Agustyati

Menteri Kabinet Merah Putih



Arifatul Choiri Fauzi
(Menteri PPPA)

Nilai
4/10



Natalius Pigai
(Menteri HAM)

Nilai
4/10

Apa yang Menjadi Masalah?

- 1 Partisipasi perempuan di politik masih terhambat diskriminasi, peminggiran, dan kekerasan, termasuk kekerasan politik di ruang digital.
- 2 Belum ada perlindungan bagi perempuan pembela HAM. Bahkan secara umum, terdapat intimidasi dan serangan terhadap masyarakat sipil yang aktif menyuarakan kritiknya kepada pemerintahan (terakhir Hafiz BEM UI diserang oleh pihak tidak dikenal, adanya pembubaran diskusi, pengambilan tanah rakyat).
- 3 Pemangkasan anggaran KemenPPPA (Inpres 1/2025, dipotong 48,86%)

Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?

- 1 Belum ada solusi maupun rumusan kebijakan yang konkret agar partisipasi politik perempuan lebih bermakna.
- 2 Menyediakan call center untuk laporan kekerasan terhadap perempuan.
- 3 Mengubah layanan bagi korban menjadi hanya lewat *call center*.
- 4 Program pemberdayaan ekonomi dan kredit khusus perempuan.

Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?

- 1 Keterwakilan perempuan di lembaga publik hanya dilihat sebagai angka, bukan upaya membuka ruang publik yang bisa diakses perempuan.
- 2 Setelah efisiensi, laporan hanya bisa lewat *call center*. Cara ini tidak efektif karena tidak memberi perlindungan menyeluruh bagi perempuan pembela HAM. Bahkan, negara kadang ikut melakukan kekerasan terhadap pembela HAM, termasuk perempuan pembela HAM.
- 3 Anggaran dipangkas untuk membiayai PSN yang lebih paopulis. Dampaknya sampai ke daerah, misalnya biaya visum korban kekerasan seksual

Solusi yang Seharusnya Dilakukan

- 1 Pelibatan perempuan dalam pembangunan seharusnya tidak sekadar menggugurkan kewajiban saja. Tetapi harus bersanding dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahan karena tujuannya adalah untuk mengubah perspektif dan pembangunan bisa mengarusutamakan gender.
- 2 Meningkatkan anggaran untuk penanganan kekerasan perempuan dan penyediaan ruang aman bagi korban untuk melaporkan dan mendapatkan perlindungan baik fisik maupun mental.
- 3 Memastikan UU pemilu dan UU parpol semakin inklusif.

Menteri Hukum & Kebijakan Negara

Menteri Kabinet Bayangan



Yance Arizona

Menteri Kabinet Merah Putih



Yusril Ihza Mahendra

(Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan)

Nilai
4/10



Supratman Andi Agtas

(Menteri Hukum)

Nilai
4/10



Agus Andrianto

(Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan)

Nilai
2/10



Rini Widyantini

(Menteri PANRB)

Nilai
3/10



ST Burhanuddin

(Jaksa Agung)

Nilai
2/10

Apa yang Menjadi Masalah?

- 1 Pemberantasan korupsi.
- 2 Sinergi antarlembaga penegak hukum.
- 3 Warga yang mempertahankan tanahnya dikriminalisasi.
- 4 Penertiban kawasan hutan.
- 5 Ketidakadilan yang dialami masyarakat kecil.

Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?

- 1 Menyiapkan RUU Perampasan Aset.
- 2 Menjadikan Kejaksaan lembaga utama pemberantasan korupsi.
- 3 Penegakan hukum dan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- 4 Membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan dengan pendekatan militeristik.
- 5 Menteri Hukum membuat program "Pasti Ada Solusi Bersama Menteri Hukum" setiap Jumat.

Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?

- 1 Aturan yang sudah ada (UU Tipikor dan UU TPPU) belum dimaksimalkan. Cakupan RUU Perampasan Aset terlalu luas sehingga Kejaksaan mendapat kewenangan berlebihan, yang justru membuka peluang korupsi dalam penegakan hukum. RUU ini juga mengabaikan prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*).
- 2 Pemberantasan korupsi dipakai untuk menyasar oposisi politik. Di sisi lain, ada pejabat kejaksaan yang korup dan KPK makin dilemahkan.
- 3 Akar masalahnya, yaitu konflik kepemilikan tanah, tidak diselesaikan. Pengakuan atas hak rakyat dan masyarakat adat juga masih lemah.

Solusi yang Seharusnya Dilakukan

- 1 Membuat aturan untuk mencegah konflik kepentingan, yang menjadi cikal bakal korupsi.
- 2 Merevisi UU KPK untuk memulihkan independensi KPK.
- 3 Segera mengesahkan UU Masyarakat Adat.
- 4 Merevisi UU Bantuan Hukum agar akses bantuan hukum lebih luas, bukan hanya untuk warga miskin, tetapi juga warga yang menghadapi konflik struktural. Dana bantuan hukum juga perlu ditambah.

Menteri Dalam Negeri & Keamanan Negara

Menteri Kabinet Bayangan



Armand Suparman

Menteri Kabinet Merah Putih



Muhammad Tito Karnavian
(Mendagri)

Nilai
3/10



Dudung Abdurachman
(Menko Polkam, sejak 1 Okt 2026; menggantikan Djamari Chaniago)

Nilai
1/10



Suyudi Ario Seto
(Kapolri, sejak 1 Okt 2026; menggantikan Listyo Sigit Prabowo)

Nilai
1/10



Yandri Susanto
(Menteri Desa dan PDT)

Nilai
2/10

Apa yang Menjadi Masalah?

- 1 Beban ASN/PPPK makin berat bagi daerah.
- 2 Ruang gerak (diskresi) pemda makin sempit.
- 3 Korupsi kepala daerah.
- 4 Ketahanan ekonomi lemah.
- 5 Pembangunan infrastruktur daerah mandek akibat pemangkasan TKD.

Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?

- 1 Menata ASN/PPPK, membatasi formasi, dan mewacanakan penarikan pembiayaan atau pengelolaan tenaga tertentu ke pusat (resentralisasi).
- 2 Memperketat earmarking, belanja wajib (*mandatory spending*), prioritas nasional, dan pengendalian APBD.
- 3 Menaikkan gaji kepala daerah dan pilkada lewat DPRD.
- 4 Membentuk Koperasi Desa Merah Putih.
- 5 Menerbitkan Inpres Infrastruktur.

Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?

- 1 Memindahkan beban tidak sama dengan menyelesaikan masalah. Jika urusan ditarik ke pusat tanpa membenahi pembagian kewenangan dan pembiayaan, yang terjadi hanya resentralisasi fiskal tanpa pembenahan fungsi.
- 2 APBD berubah jadi "anggaran instruksi" karena makin banyak dana yang penggunaannya sudah ditentukan.
- 3 Selama kewenangan besar, pengawasan lemah, dan penegakan hukum tidak pasti, berapa pun gajinya tidak akan mencegah korupsi. Biaya politik juga tidak hilang, hanya pindah arena: dari membeli dukungan pemilih menjadi

Solusi yang Seharusnya Dilakukan

- 1 Bagi beban secara adil: pusat membiayai mandat nasional, daerah mengelola kebutuhan lokal. Gaji PPPK tetap digaji Daerah (APBD) melalui penambahan pada TKD (DAK) sesuai kebutuhan masing-masing Daerah.
- 2 Kembalikan diskresi fiskal: pusat tetapkan standar, daerah menentukan cara mencapainya.
- 3 Perkuat pengawasan, transparansi, APIP, DPRD dan penegakan hukum—bukan kurangi otonomi politik.
- 4 Bangun ekonomi berbasis potensi lokal: desa menentukan usaha, pusat membuka akses modal dan pasar, perkuat BumDes.

Sekretaris Kabinet

Menteri Kabinet Bayangan



**Ahmad Jilul
Qur'ani Farid**

Menteri Kabinet Merah Putih



**Teddy Indra
Wijaya**
(Sekretaris
Kabinet)

Nilai

3/10

Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
1 Seskab dijabat perwira TNI aktif, padahal UU TNI hanya membolehkan prajurit aktif mengisi jabatan sipil tertentu. 2 Fungsi dukungan kebijakan Setkab melemah sejak statusnya diturunkan dari setingkat menteri menjadi di bawah Kemensetneg. 3 Manajemen kabinet tidak stabil: tujuh kali reshuffle dalam dua tahun, termasuk tiga Menkeu dalam kurang dari dua tahun. 4 Seskab berperan sebagai juru bicara de facto, bukan pengelola sidang kabinet dan analisis kebijakan.	1 Mempertahankan status prajurit aktif, bahkan menaikkan pangkat dari Mayor ke Letkol, dengan dalih Seskab berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Perpres 148/2024). 2 Menempatkan Setkab di bawah Kemensetneg lewat Perpres 148/2024. 3 Melakukan reshuffle mendadak tanpa evaluasi kinerja terbuka maupun penjelasan resmi, seperti pencopotan Menkeu Purbaya (14 September 2026). 4 Membela kebijakan dengan klaim legitimasi elektoral ("96 juta pemilih") dan ikut mengumumkan hasil negosiasi teknis, seperti tarif resiprokal AS.	1 Supremasi sipil melemah dan muncul preseden bahwa undang-undang bisa diakali dengan Perpres. Posisi di jantung pengambilan keputusan sipil berada dalam rantai komando militer, sehingga konflik loyalitas sulit dihindari. 2 Presiden kehilangan "dapur kebijakan". Tanpa analisis lintas sektor, program prioritas seperti MBG, Kopdes, dan Sekolah Rakyat lahir tanpa kajian dan saling bertabrakan. 3 Kesinambungan kebijakan terputus dan kepercayaan pasar turun, misalnya saat Menkeu dicopot di tengah tekanan rupiah. Menteri terdorong bekerja untuk menyenangkan Presiden, bukan mencapai target.	1 Seskab dijabat pejabat sipil profesional, atau perwira aktif mundur dari dinas sesuai Pasal 47 UU TNI; hapus dalih struktural dalam Perpres 148/2024. 2 Mengembalikan Setkab sebagai unit kebijakan (policy unit) setingkat menteri yang wajib menyiapkan analisis dampak lintas sektor dan opsi kebijakan sebelum keputusan sidang kabinet. 3 Menetapkan kontrak kinerja menteri dengan indikator terukur yang dievaluasi tiap semester dan diumumkan ke publik, agar reshuffle berbasis kinerja. 4 Menyerahkan fungsi juru bicara kepada satu jubir resmi; Seskab fokus pada manajemen kabinet, notulensi,

Menteri Pertahanan

Menteri Kabinet Bayangan



Curie Maharani

Menteri Kabinet Merah Putih



Sjafrie Sjamsoeddin
(Menhan)

Nilai

6/10

Apa yang Menjadi Masalah?

Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?

Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?

Solusi yang Seharusnya Dilakukan

1 Perang konvensional kembali terjadi (terutama di Ukraina, Iran, dan mungkin di Selat Taiwan) dan persaingan negara adidaya makin tajam. Akibatnya, pangan, energi, teknologi, dan sektor lain makin rawan, termasuk bagi Indonesia.

2 Sebelum 2025, anggaran pertahanan di bawah 1% PDB, jauh di bawah rata-rata dunia (2,5%) dan Indo-Pasifik (1,6–1,7%, data SIPRI). Ini salah satu penyebab modernisasi alutsista tidak tercapai: hanya 65,49% dari target Minimum Essential Force pada akhir 2024.

3 Perwira TNI (kolonel dan jenderal) menumpuk sehingga banyak

1 a. Mengerahkan TNI untuk program prioritas nasional seperti kedaulatan pangan, energi, air, dan ekonomi hijau (Asta Cita pilar 2).
b. Merevisi UU TNI: operasi militer selain perang ditambah dari 12 jadi 14 (termasuk perlindungan

1 WNI di luar negeri dan pertahanan siber), dan kementerian/lembaga yang boleh diisi prajurit aktif ditambah dari 10 jadi 14 (BNPT, Bakamla, BNPB, BNPP).

c. Menempatkan perwira aktif dan purnawirawan di jabatan politik di kementerian dan BUMN.

2 a. Menaikkan anggaran pertahanan bertahap hingga 1.5% PDB. Di

1 TNI dialihkan dari peran utamanya sebagai komponen pertahanan negara, sehingga berisiko melemahkan pertahanan dari ancaman negara lain. Menempatkan prajurit aktif di bidang yang tidak mereka kuasai bertentangan dengan profesionalisme

1 dan meritokrasi, dan justru memperkecil peluang program Presiden berhasil (perlu dikaji kaitan anjloknya elektabilitas Presiden dengan pengerahan militer besar-besaran di program strategis). Remiliterisasi juga memicu gesekan dengan masyarakat, misalnya TNI dipakai dalam sengketa tanah antara negara dan rakyat.

1 TNI fokus pada profesionalisme, modernisasi alutsista, kesejahteraan prajurit, serta mendukung kemandirian pemenuhan alutsista dari dalam negeri sesuai UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

2 Menegakkan amanat Reformasi untuk transparansi dan akuntabilitas perencanaan, penganggaran dan pengadaan pertahanan.

3 Membenahi pembinaan karier agar merit-based dan bukan berdasarkan nepotisme dengan berpedoman kepada UU Pertahanan Negara.

4 Menempatkan pengadaan alutsista dari luar

Menteri Luar Negeri

Menteri Kabinet Bayangan



**Shofwan Al-Banna
Choiruzzad**

Menteri Kabinet Merah Putih



Sugiono

Nilai

6/10

Apa yang Menjadi Masalah?	Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?	Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?	Solusi yang Seharusnya Dilakukan
1 Kerentanan geopolitik meningkat akibat persaingan negara-negara besar. 2 Dunia memasuki era ketidakpastian: ketegangan geopolitik, melemahnya tatanan dan institusi multilateral, fragmentasi ekonomi, serta krisis energi dan iklim. 3 Persatuan dan sentralitas ASEAN terancam. 4 Ketergantungan pada negara besar makin tinggi. 5 Genosida dan pembersihan etnis terhadap Palestina mengancam cita-cita nasional "mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".	1 Mendekat ke semua kekuatan besar tanpa perencanaan koheren, sehingga menjadi "appeasement" yang saling bertentangan: ke Tiongkok (joint development di wilayah tumpang tindih klaim, Passing Exercise di wilayah sensitif) dan ke AS (konsesi anti-Tiongkok dalam perjanjian ART, rencana Blanket Overflight, Kertajati sebagai pusat MRO Hercules C-130 AS, bergabung dengan Board of Peace). 2 Hadir di banyak forum negara besar ("if you are not on the table, you are on the menu"), tetapi tanpa agenda yang koheren, sangat personalistik, dan kurang didukung kelembagaan. 3 Belum punya visi yang jelas untuk ASEAN, sementara	1 Indonesia terlihat tidak berprinsip sehingga tidak dipercaya, dan negara besar terdorong menekan karena Indonesia mudah memberi konsesi. Konsesi seperti <i>overlapping claims</i>, <i>blanket overflight</i>, dan BoP juga berisiko melanggar kepentingan nasional dan UUD NRI 1945. 2 Banyak kunjungan tanpa agenda yang koheren membuat kesepakatan dan pernyataan sulit dijalankan, sehingga kredibilitas Indonesia turun. 3 Tanpa visi Indonesia, ASEAN berisiko kehilangan persatuan dan sentralitas, sehingga kawasan kehilangan alat meredam ketegangan dan bisa terseret konflik	1 Menjalankan bebas aktif secara terencana, koheren, dan sesuai undang-undang serta kepentingan nasional, agar Indonesia tidak menjadi "tidak bebas" dan "pasif" meski sibuk berkunjung. Rencana <i>Blanket Overflight</i> perlu dibuka ke publik dan dibatalkan bila masih berlanjut. 2 Memaksimalkan modal yang sudah ada, terutama ASEAN dan solidaritas negara berkembang, dengan dukungan kelembagaan yang optimal. 3 Menyusun visi ASEAN yang jelas dan mengambil peran kepemimpinan di ASEAN. 4 Memperkuat kapasitas domestik dan diversifikasi secara terukur dan

Menteri Pertanian & Kedaulatan Pangan

Menteri Kabinet Bayangan



Isnawati Hidayah

Menteri Kabinet Merah Putih



Zulkifli Hasan
(Menko Pangan)

Nilai
2/10



Andi Amran Sulaiman
(Menteri Pertanian;
juga Kepala Badan
Pangan Nasional)

Nilai
3/10



Sakti Wahyu Trenggono
(Menteri Kelautan
dan Perikanan)

Nilai
3/10



Sudaryono
(Kepala Badan
Gizi Nasional,
sejak 22 Jul
2026;
menggantikan
Nanik S. Deyang)

Nilai
2/10

Apa yang Menjadi Masalah?

- 1 Kebijakan pangan terlalu top-down, seragam, dan minim uji coba berbasis bukti, padahal kondisi petani, nelayan, komoditas, pasar, dan persoalan gizi berbeda antarwilayah.
- 2 Kebijakan pertanian seragam (*one-size-fits-all*), subsidi pupuk berbelit, dan petani kecil kurang diperkuat.
- 3 Program nelayan mengejar pembangunan fisik, bukan pendapatan dan kesejahteraan nelayan.
- 4 Program gizi mengejar jumlah porsi, bukan hasil gizi.
- 5 Koperasi Desa Merah Putih membangun gerai baru, tetapi tidak menjawab masalah rantai pasok, pemasaran, dan posisi tawar produsen desa.

Apa yang Dikerjakan Menteri Kabinet Merah Putih?

- 1 Meluncurkan program berskala besar (MBG, Kopdes Merah Putih, *food estate*, Kampung Nelayan Merah Putih) dengan target nasional dan pembangunan fisik masif, sebelum kebutuhan lokal, kesiapan kelembagaan, dan efektivitas modelnya teruji.
- 2 Mengandalkan proyek pangan skala besar yang belum terbukti seperti *food estate*, menyalurkan subsidi pupuk lewat rantai birokrasi distribusi yang panjang, dan menjadikan penyuluh sekadar pelaksana program pusat.
- 3 Membangun Kampung Nelayan Merah Putih dengan paket infrastruktur dari pusat, tanpa melibatkan koperasi atau kelompok nelayan dalam menentukan kebutuhannya.

Mengapa Akhirnya Memperburuk Keadaan?

- 1 Instrumen ditentukan sebelum masalahnya dipastikan. Satu model nasional untuk semua wilayah berisiko membangun infrastruktur yang tidak dibutuhkan, melahirkan lembaga baru yang tumpang tindih, dan menghabiskan anggaran untuk program yang manfaatnya belum teruji.
- 2 Dana proyek baru berskala masif tidak tersedia untuk memperkuat yang sudah bekerja, seperti penyuluhan dan infrastruktur produksi. Tanpa evaluasi berbasis hasil, tidak jelas apakah pendapatan, produktivitas, dan posisi tawar petani benar-benar naik.
- 3 Desa nelayan berisiko menerima infrastruktur yang tidak mereka perlukan, sementara kebutuhan nyata seperti rantai

Solusi yang Seharusnya Dilakukan

- 1 Mengaudit MBG, *food estate*, dan Kopdes berdasarkan manfaat, biaya, dan dampak lokal; menyusun kebijakan dari pemetaan kebutuhan kabupaten/desa; dan mewajibkan piloting, evaluasi independen, serta partisipasi masyarakat sebelum program diperluas.
- 2 Menyalurkan subsidi pupuk langsung (*tunai/cashless*), menyesuaikan kebijakan dengan agroekologi tiap daerah, dan mengalihkan investasi dari proyek pangan skala besar ke petani kecil: irigasi, penyuluhan, benih lokal, pascapanen, dan akses pasar.
- 3 Menggeser fokus Kampung Nelayan Merah Putih ke pendapatan nelayan (rantai dingin, akses pasar, BBM, pembiayaan,

4.1.

Pusat Pemerintahan: Masalah Konstitusional dan Manajerial

- ▲ Masalah Sekretariat Negara berada di tingkat konstitusi: tanpa disiplin hukum di puncak kekuasaan, pembenahan administrasi istana tidak akan mengubah apa pun.
- ▲ Reshuffle yang berulang adalah gejala dari kabinet yang dikelola tanpa dapur kebijakan, tanpa ukuran kinerja, dan tanpa catatan keputusan yang dapat diaudit; selama itu tidak dibenahi, pergantian menteri hanya mengganti orang.

4.2.

Sektor-Sektor: Kendali Menguat, Layanan Melemah

- ▲ Quasi fiskal memanfaatkan anggaran diluar ketentuan demi memuluskan program prioritas, menyebabkan rentetan risiko menular dari APBN ke perbankan dan ujungnya merugikan pembayar pajak.
- ▲ Petani, dan masyarakat adat menanggung beban program yang dirancang di pusat tanpa kajian dan tanpa partisipasi.
- ▲ Anggaran dan perhatian berpindah ke program yang mudah dipamerkan, dan koreksi dari dalam dibungkam ketika layanan dasar paling membutuhkannya.
- ▲ Negara memperkuat aparat dan pengawasan atas warganya, sembari melemahkan pengawasan atas dirinya sendiri.

4.3.

Benang Merah dan Evaluasi Utama

Keputusan mendahului kajian



Program baru menggerus layanan



Kewenangan dan anggaran dipusatkan



Risiko dialihkan ke publik



Pendekatan keamanan yang mempersempit ruang kritik

Kelimanya bekerja sebagai satu rantai.